

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan suatu bangsa, sebagaimana diatur dalam amandemen ke empat UUD 1945 Pasal 31, sehingga pendidikan harus mampu memfasilitasi perubahan demi terwujudnya pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa masalah yang menonjol seperti yang dikemukakan Yahya A. Muhaimin yang dikutip dalam sambutan menteri pendidikan nasional, yaitu: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademisi dan kemandirian.

Reformasi pemerintah yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Hal yang lebih esensial dari otonomi adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus segala permasalahan yang tercakup dalam pembangunan masyarakat di daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan seperti diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu dalam pasal 14 (1) menyebutkan bahwa :urusan wajib menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten / kota merupakan urusan berskala kabupaten / kota meliputi<sup>1</sup> :

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, hlm: 14

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintah
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Untuk mengantisipasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh perlu kiranya dibangun jalinan kerjasama yang kokoh dan lebih teratur antara pejabat pemerintah dibidang pendidikan dengan pemertintah daerah dan masyarakat agar usaha mencari jalan keluar berbagai persoalan pendidikan dapat dilakukan secara bersama-sama.

Salah satu prinsip dalam otonomi daerah adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan serasi antara pusat, propinsi, dan daerah serta antar daerah. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka perlu tercipta suatu mekanisme yang harmonis diantara para “*stakeholders*” pendidikan. Pada tingkat pusat hubungan tersebut diperlukan antara Departemen dan kantor menteri negara yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu dalam menetapkan berbagai kebijakan

yang menjadi kewenangan masing-masing ditingkat pusat, sedang di tingkat propinsi dan kabupaten / kota diperlukan jalinan kerjasama antara pihak eksekutif, legislatif, dan wakil dari masyarakat sebagai pelaksana berbagai kebijakan dari pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang baru tentang otonomi pendidikan telah membawa implikasi terhadap paradigma pengembangan kurikulum antara lain pembaharuan dan defersifikasi kurikulum, antisipasi keadaan masa datang dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi yang multi dimensional.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi dibidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai bentuk otonomi sekolah untuk memotifasi guru untuk labig aktif dan kreatif melakukan berbagai upaya agar semua kebutuhan sekolah terpenuhi. Meningkatkan kepedulian sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.

Pada kurikulum sebelumnya, sekolah hanya berfungsi melaksanakan kurikulum yang telah disusun secara terpusat. Sekolah apalagi masyarakat kurang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum, akibatnya peran sekolah terlebih lagi masyarakat sangat terbatas. Tidak demikian dengan KTSP, sebagai kurikulum operasional, KTSP menuntut keterlibatan masyarakat secara penuh, sebab tanggung jawab pengembangan kurikulum tidak lagi berada di pemerintah, akan tetapi di sekolah; sedangkan sekolah akan berkembang manakala ada keterlibatan masyarakat.

Upaya penyempurnaan kurikulum bertujuan untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya yakni aspek-

aspek moral, ahlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni, dan budaya. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik dalam kehidupan di daerah dan di sekolah.

Pemerintah kota surakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satu di antaranya kebijakan dibidang pendidikan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang termaktup dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang rencana strategi daerah kota surakarta tahun 2003 sampai 2008 dan hal itu pun sejalan dengan arah kebijakan umum (prioritas pembangunan kota surakarta). Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah kota Surakarta bahwasanya pendidikan diwenangkan pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga untuk mempersiapkan dan melaksanakan otonomi di bidang pendidikan khususnya dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 pada Sekolah Menengah Atas, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang berdayaguna dan berhasil guna. Gambaran umum tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan di kota Surakarta hingga saat ini belum pernah ada evaluasi sebagai “pendampingan” atas pelaksanaan otonomi yang menyangkut berbagai masalah pelaksanaan kebijakan pendidikan, padahal penelitianj tentang hal tersebut sangat perlu dilakukan agar pelaksanaan otonomi pendidikan di kota surakarta “tidak terkesan berjalan begitu saja” tanpa adanya “*feedback*” untuk memperbaiki pelaksanaannya.

Kurikulum bukanlah materi pelajaran yang terpisah yang harus disampaikan dan dipelajari, melainkan merupakan bentuk pengalman dan kebudayaan individu yang harus dipelihara dimodifikasi. Dengan demikian kurikulum harus mencakup dua sisi yang sama penting yaitu perencanaan pembelajaran serta bagaimana perencanaan itu di implementasikan menjadi pengalaman belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi

tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi yang dapat dikembangkan evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan serta implementasi dari dokumen yang drancang dalam bentuk nyata.

Sebagian kepala sekolah, guru, pengawas belum memahami secara utuh esensi dari KTSP (waktu sosialisasi, pembuatan dan pelaksanaannya nyaris bersamaan dengan model sosialisasi) “berantai”. Kompetensi dan kultur kerja guru saat ini menjadi penghambat pembuatan KTSP yang sesuai dengan tuntutan. Peranan dunia pendidikan dalam pembangunan suatu bangsa, Implikasi pelaksanaan otonomi pendidikan terhadap Permendiknas No. 22 tahun 2006, Peranan “*Stakeholders*” dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, Implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi serta strategi penyelesaiannya oleh pelaksana kebijakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NO. 22 TAHUN 2006 TENTANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA SURAKARTA)

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah dengan dikeluarkannya PERMENDIKNAS No. 22 Tahun 2006 pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah atas kota Surakarta?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak sekolah menengah atas (SMA) Surakarta dalam rangka melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006?
3. Strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah menengah atas (SMA) di kota Surakarta terhadap permasalahan Otonomi Pendidikan

dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pemerintah Kota Surakarta (Dinas Dikpora) dalam rangka pelaksanaan kurikulum KTSP 2006 dengan ketentuan PERMENDIKNAS NO. 22 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 oleh Sekolah Menengah Atas di Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak Sekolah Menengah Atas Surakarta dalam pelaksanaan KTSP 2006.
4. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Surakarta terhadap permasalahan otonomi pendidikan dalam rangka pelaksanaan KTSP 2006.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1.) Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya studi kebijakan publik.
- 2.) Hasil penelitian diharapkan sebagai wacana perubahan dalam bidang pendidikan dan hukum untuk menuju kepastian dan kebenaran formal bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah dibidang Pendidikan di masa yang akan datang.

- 2) Memberi gambaran yang konkret mengenai pelaksanaan kebijakan otonomi dalam bidang pendidikan dikaitkan dengan pelaksanaan KTSP 2006 pada sekolah menengah atas.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan serta Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik

###### a. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Jones dalam bukunya Van Meter implementasi diartikan sebagai “*Getting the Job done and doing it*”. Menurut Jones untuk melaksanakan implementasi diperlukan adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut sebagai *resources*. Lebih lanjut Jones mengemukakan batasan implementasi sebagai *process getting additional resources so as to figure out what is to be done*. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.<sup>2</sup>

Difinisi implementasi tersebut kurang lebih merupakan suatu tahap dari kebijaksanaan yang terdiri dari dua macam tindakan yaitu, pertama : melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi, ke dua : merumuskan tindakan yang dilakukan. Sedangkan menurut Van Meter memberikan batasan definisi implementasi sebagai berikut :

*Policy implementation encompasses those by public and private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set fort in prior policy decisions. This includes both one time efforts to transform decisions*

---

<sup>2)</sup> Jones , Van Meter , *The Policy Implementation Process A Conceptional From Work*, Departemenft Of Political Science Chio State University, 1994, hlm: 67-69

*into operational term, as well as continuing efforts to achieve the large and small change mandated by policy decisions*<sup>3</sup>.

“ Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun individu (kelompok), swasta, yang diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu ”.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut James P. Laster, Joseph Stewart dan Budi Winarno menyatakan bahwa Implementasi kebijakan dapat dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, sedangkan implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.<sup>4</sup>

Sementara Van Meter, Van Horn dan Budi Winarno membatasi implementasi kebijakan “ sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya ”. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang

---

<sup>3</sup>) *Ibid*, hlm. 100.

<sup>4</sup>) Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Jakarta, 2002, hlm. 101.

melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia<sup>5</sup>, dana, dan kemampuan, organisasional, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### b. Model Proses Implementasi Kebijakan

Bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan, organisasional, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Van Meter, Van Horn dan Budi Winarno* menawarkan suatu model proses implementasi kebijakan yang mempunyai enam variable yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut<sup>6</sup> :

##### a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

##### b) Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

---

<sup>5</sup> *Loc.cit*, hlm.101.

<sup>6</sup> *Op.cit.*,

- c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan  
Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- d) Karakteristik badan-badan pelaksana  
Karakteristik badan-badan administratif berkaitan dengan struktur birokrasi yakni karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif maupun hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
- e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik  
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan pusat perhatian yang besar dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel di lingkungan dari hasil-hasil kebijakan.
- f) Kecenderungan pelaksana (Implementers)  
Berkaitan dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan itu sendiri, seperti; kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

2. Menurut *James P. Lester dan Joseph Stewart* studi implementasi kebijakan, tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan-kebijakan bagi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor<sup>7</sup>:

- a) Komunikasi  
Secara umum proses komunikasi kebijakan terdiri dari :
  1. Transmisi

---

<sup>7</sup> *Ibid*; hlm. 101

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, maka ia harus menyadari bahwa keputusan dan peraturan untuk pelaksanaannya telah dibuat dan dikeluarkan sehingga hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan perintah dapat ditekan sekecil mungkin. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan
- b. Informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi
- c. Pada akhirnya penangkapan komunikasi di hambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan-kebijakan

## 2. Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi harus dikomunikasikan secara jelas.

## 3. Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berjalan secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

### b) Sumber-sumber untuk mencapai tujuan

Sumber-sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam implemetasi kebijakan, yang meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

### c) Kecenderungan-kecenderungan

Jika pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi lebih mudah.

### d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling penting bahkan secara keseluruhan merupakan pelaksana kebijakan. Ada beberapa karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yaitu :<sup>8</sup>

1. Birokrasi dimanapun berada dipilih sebagai instrument sosial yang ditujukan untuk masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik.
  2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan yang tingkat kepentingannya berbeda untuk masing-masing tahap.
  3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
  4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks
  5. Birokrasi tidak pernah punah, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi
  6. Birokrasi bukan merupakan suatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh di kontrol kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya.
- e) Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP)

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam implementasi salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (standard operating procedures, SOP). SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil untuk melaksanakan kebijakan, disamping itu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan-perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

---

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm.114

### c. Mekanisme Kebijakan Publik

Menurut Amin Ibrahim ada berbagai acuan yang digunakan dalam menentukan kebijakan publik antara lain :<sup>9</sup>

- 1.) Perundang-undangan yang berlaku
- 2.) Harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain :
  - a) *Re-Inventing government*, yaitu dengan
    1. Pemerintah harus mampu mengarahkan ketimbang mengayuh
    2. Pemerintah milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang melayani).
    3. Pemerintah yang kompetitif (menyuntikkan persaingan kedalam pemberian pelayanan).
    4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi
    5. Pemerintah yang berorientasi pada hasil
    6. Pemerintah dengan prinsip wirausaha (ketimbang membelanjakan)
    7. Pemerintahan antisipatif (mencegah daripada mengobati)
    8. Pemerintahan desentralisasi
    9. Pemerintahan yang berorientasi pada pasar (mendongkrak perubahan melalui pasar)
  - b) *Good Government*
    1. Mengikutsertakan semua
    2. Transparan dan bertanggung jawab
    3. Efektif dan efisien
    4. Menjamin supremasi hukum
    5. Menjamin prioritas dibidang politik, sosial, ekonomi di dasarkan pada konsensus masyarakat

---

<sup>9)</sup> Amin Ibrahim, *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.3-4.

6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumber dana pembangunan
  7. Fisi strategis pemimpin serta masyarakat yang mampu melihat kedepan dari suatu pemerintahan yang baik, bahwa pembangunan untuk manusia (kelayakan sosial)
- c) Demokratis (sejauh mungkin mengikutsertakan *Stakeholders* pembangunan baik dalam proses pelaksana maupun pengawasan)
  - d) Kondisi lingkungan strategis
    1. Kecenderungan dalam negeri
    2. Kecenderungan regional / kawasan
    3. Kecenderungan global
  - e) Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat<sup>10</sup>

#### d. Model Pendekatan Analisis Kebijakan Publik

Dalam menentukan kebijakan publik ada beberapa model pendekatan analisis kebijakan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budi Winarno yaitu : <sup>11</sup>

##### a.) Pendekatan Kelompok

Secara garis besar ini menyatakan bahwa pembuatan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Suatu kelompok merupakan kumpulan individu-individu yang diikat oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama. Kebijakan public pada sewaktu-waktu tertentu dalam pandangan ini merupakan *Equilibrium* yang dicapai dalam perjuangan berbagai kelompok. *Equilibrium* ini ditentukan oleh pengaruh relatif dari kelompok-kelompok kepentingan yang diharapkan akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam proses pembuatan kebijakan publik.

---

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>11)</sup> Budi Winarno, *op.cit.*, hlm. 41

#### b.) Pendekatan Proses Fungsional

Harold Laswel (Budi Winarno) mengemukakan 7 kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional, yaitu : <sup>12</sup>

1. *Intelegensi*, bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan yang mendapat perhatian para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.
2. *Rekomendas*, bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif untuk mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan.
3. *preskripsi*, bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau diterapkan oleh siapa.
4. *Permohonan*, siapa yang menentukan apakah perilaku tertentu bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang dan menuntut penggunaan peraturan-peraturan atau undang-undang.
5. *Aplikasi*, bagaimana undang-undang atau peraturan sebenarnya diterapkan atau diberlakukan.
6. *Penilaian*, bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau kegagalan itu dinilai
7. *Terminasi*, bagaimana peraturan-peraturan atau undang-undang semula dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk perubahan atau dimodifikasi.

#### c.) Pendekatan Kelembagaan (Institusionalisme)

Suatu kebijakan tidak menjadi kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah memberi dua karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik. *Pertama*, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. *Kedua*, Kebijakan-kebijakan pemerintah memerlukan Universalitas.

---

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm.,41

d.) Pendekatan Peran Serta Warga Negara

Dengan keikutsertaan warga Negara dalam masalah-masalah masyarakat, maka para warga Negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau prespektif mereka diluar batas-batas kehidupan pribadi.

Adapun pendekatan yang hendak dipilih dalam menganalisis kebijakan publik adalah pada aspek tujuan dari perumusan kebijakan publik itu sendiri, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, yang berkaitan dengan : Perundang-undangan, pelaksanaan, masyarakat.

e. Hubungan hukum dan kebijakan publik

Dalam hubungannya antara hukum dan kebijakan publik, Raksasatya (dalam T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini) mengemukakan bahwa kebijakan publik (*Public policy*) pada dasarnya memiliki tiga elemen yaitu :<sup>13</sup>

- a.) Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai
- b.) Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan
- c.) Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik maupun strategi tersebut di atas

Dari tiga elemen dalam kebijakan publik tersebut terlihat dengan jelas bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang berorientasi pada tindakan. Artinya, disini bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kerja konkrit dan adanya sebuah organisasi

---

<sup>13</sup> Saiful Bahri, Nessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini, *Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik*, Jogjakarta, 2004, hlm. 24

pemerintah, dan organisasi pemerintah yang dimaksud adalah sebagai sebuah institusi yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas kepublikan. Yaitu tugas-tugas yang mencakup hajat hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang disebut Negara. Dan tugas-tugas kepublikan tersebut lebih konkrit lagi adalah berupa serangkaian program-program tindakan yang hendak direalisasikan dalam bentuk nyata. Untuk itu, diperlukan serangkaian pentahapan dan manajemen tertentu agar tujuan tersebut terrealisir. Rangkaian proses realisasi tujuan publik tersebutlah yang dimaksudkan dengan kebijakan publik.

Dari pemahaman tersebut, pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi yang menurut Irfan Islamy (dalam T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini), sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau di implementasikan secara nyata
3. Kebijakan publik tersebut pada hakikatnya harus memiliki tujuan0tujuan dan dampak-dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu
4. Dan pada akhirnya, segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.

Menurut Barclay dan Birkland dalam (T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini),<sup>15</sup> hubungan antara hukum dan kebijakan publik yang pertama dan mendasar adalah: “untuk melihat hubungan antara hukum dan kebijakan publik, yaitu pemahaman kebijakan publik pada umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dan pada dasarnya

---

<sup>14</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

<sup>15</sup> Hesel Nogi S Tangkilan, *kebijakan Publik Yang Membumi (konsep, strategi, dan kasus)*, Lukman Offset, Yogyakarta, 2003

sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik”.<sup>16</sup> Dari pemahaman dasar ini kita dapat melihat keterkaitan diantara keduanya dengan jelas hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat :

- a. Pembentukan hukum dan kebijakan publik
- b. Implementasi
- c. Evaluasi

Proses pembuatan kebijakan publik berangkat dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari jalan keluar yang baik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang ada sekarang. Hasil pilihan solusi tersebut yang dinamakan hasil kebijakan publik.

Menurut pendapat Setiono sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan sesungguhnya tidak sekedar keterkaitan yang ada di antara keduanya, pada banyak sisi justru ada kesamaannya. Keduanya berangkat pada fokus yang sama dan berakhir pada muara yang sama pula. Hanya saja pada proses pembentukan hukum hasil akhirnya lebih difokuskan pada terbentuknya sebuah aturan dalam bentuk undang-undang, sedangkan pada proses formulasi kebijakan publik hasil akhirnya pada terpilihnya sebuah alternatif solusi bagi penyelesaian masalah-masalah publik tertentu.<sup>17</sup>

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama yang diharapkan adalah terbentuknya undang-undang yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat matang kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab bila sebuah produk hukum tidak

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, UNS Pers, Surakarta, 2005, hlm. 4-6

memiliki kemampuan yang cukup tersebut maka bukan tidak mungkin justru produk hukum tersebut akan membelenggu masyarakat.

Dalam melakukan penerapan hukum (*rechtstospassing*) membutuhkan kebijakan publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan mengkontektualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang ada di masyarakat, sebab jika responsifitas aturan masyarakat hanya sepenuhnya diserahkan pada hukum semata maka akan terjadi pemaksaan-pemaksaan hokum yang tidak sejalan dengan cita-cita hokum itu sendiri yang ingin menyejahterakan masyarakat jika institusi pengatur masyarakat sepenuhnya diserahkan pada hokum, maka bisa jadi hokum itu sendiri pada gilirannya akan menjadi sumber ketidakadilan . penerapan hukum menjadi sangat tergantung pada kebijakan publik sebagai sarana yang adapat mensukseskan berjalannya penerapan hokum itu sendiri. Dengan begitu secara tersirat sesungguhnya dapat terlihat bahwa kebijakan publik yang dibuat bukan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hokum yang ada justru sebaliknya inginberupaya agar aturan hokum itu dapat terselenggara dengan baik. Pada dasarnya di dalam penerapan hokum tergantung pada empat unsur :

1. Unsur hukum
2. Unsur struktural
3. Masyarakat
4. Budaya

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

### a. Pengertian Pendidikan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sebagai berikut :

“ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ”.

Berkenaan dengan hal itu maka, pengertian pendidikan dapat dikaji menurut beberapa ahli antara lain Ki Hajar Dewantoro yang dikutip oleh Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa : “ pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ”. selanjutnya menurut Abu Ahmadi<sup>18</sup> “ pendidikan adalah bimbingan kepada anak”.

Adapun Ngalim Purwanto berpendapat bahwa : “ pendidikan adalah segala usaha sadar orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat ”<sup>19</sup>. Selain itu pendidikan menurut Hariwung A.J adalah “ suatu konsep himpunan dari sekalian proses yang membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku alim yang bernilai positif di masyarakat dimana ia hidup ”. Dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan mengenai pengertian pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam waktu yang relative lama
2. Pendidikan merupakan bimbingan dari orang dewasa kepada anak melalui upaya pengajaran dan pelatihan
3. Pendidikan mengarah pada penyiapan peserta didik agar mampu memainkan perannya di masyarakat

---

<sup>18</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

<sup>19</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan : Teoritis dan Praktis*, Remadja Karya, Bandung, 1988

4. Pendidikan mengarah pada pengembangan perilaku positif manusia dalam hidup bermasyarakat

b. Jenis Pendidikan

Menurut Abu Ahmadi Pendidikan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu<sup>20</sup> :

- a.) Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan, masyarakat, dan organisasi.
- b.) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat, dan mengikutisyarat-syarat tertentu yang ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah.
- c.) Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dilakukan secara tertentu dan tidak sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah jenis pendidikan formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan di sekolah secara teratur dan sistematis, mempunyai jenjang dan kurun waktu tertentu berlangsung dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.

c. Jenjang Pendidikan

Pendidikan formal merupakan tempat yang paling memungkinkan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Jenjang atau tingkat pendidikan formal di Indonesia dapat dilihat pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

---

20) *op.cit.*, hlm.87

yang menyatakan bahwa: “ jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat ”.<sup>21</sup>

#### 1.) Pendidikan Dasar

##### Pasal 17

- (2) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di SD dan 3 (tiga) tahun di SLTP atau satuan pendidikan yang sederajat. Tujuan dari pendidikan dasar menekankan pada kemampuan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan yang meliputi aspek penguasaan pengetahuan dan pengertian, aspek pengembangan kemampuan dan keterampilan, aspek minat dan sikap, aspek pola tingkah laku dalam hubungan sosial dan aspek kemampuan menetapkan keputusan dalam menghadapi masalah serta mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah.

#### 2.) Pendidikan Menengah<sup>22</sup>

##### Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan.

---

21) Undang-undang No. 20 Tahun 2003.,hlm.10

22) *Ibid.*,hlm

- (3) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan atau (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan menengah merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi serta untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.

### 3.) Pendidikan Tinggi

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan system terbuka.

#### Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan aturan pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mempunyai beberapa tujuan antara lain :

- a.) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat diterapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b.) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya budaya nasional.

Dalam penelitian ini jenjang pendidikan yang dipakai adalah jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan yang lamanya 3 (tiga) tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan disekolah menengah atas atau yang sederajat. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja.

#### d. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi adalah penyerahan otoritas pusat ke daerah-daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan terbatas untuk tingkat sekolah dasar. Jenjang pendidikan di atasnya (SLTP / SLTA, Perguruan Tinggi) ditangani Depdiknas. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah menangani sebagian besar urusan pendidikan tingkat dasar hingga menengah, bahkan untuk tingkat propinsi juga meliputi sebagian urusan pengelolaan

perguruan tinggi. Perluasan wewenang pemerintah daerah ini menuntut kapasitas yang lebih tinggi daripada Pemda untuk mengelola pendidikan. Hingga tingkat tertentu, sesungguhnya Pemda melalui Diknas telah cukup memiliki modal kemampuan untuk mengemban tugas-tugas baru tersebut, karena Diknas yang ditugasi mengelola pendidikan merupakan fusi dari kantor Dinas P & K dan Kandep / Kanwil Diknas yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah penguatan kapasitas Pemda / Dinas Pendidikan untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Dalam upaya ini pusat dapat ikut berperan membagiakan kemampuannya kepada daerah, sementara daerah sendiri membuka akses yang lebih laus dengan institusi pendidikan (tinggi) yang ada di daerahnya.

Semangat penerapan desentralisasi pendidikan tidak lepas dari keberhasilan perluasan akses pendidikan SD / MI di daerah-daerah, serta tekad pemerintah untuk membelajarkan masyarakat, sekurang-kurangnya sampai jenjang SLTP melalui program wajib belajar sembilan tahun. Selama pembangunan nasional jangka panjang pertama yang dimulai pada tahun 1969/1970, bangsa Indonesia telah berhasil mencapai kemajuan besar terutama dalam pelaksanaan pemerataan kesempatan untuk memasuki sekolah (equality of access) dijenjang sekolah dasar. Menurut catatan Bappenas (2001 : 128) “ pada tahun 1995 / 1996 angka partisipasi murni usia sekolah SD / MI (7-12 Tahun) telah mencapai lebih dari 95%, sedang angka melanjutkan SD / MI ke SLTP mencapai 71, 29%. Keberhasilan ini antara lain karena didukung oleh pendanaan yang sangat besar melalui program Impres SD yang memungkinkan peningkatan sarana pendidikan, peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga pengajar, perbaikan metode belajar dan penyempurnaan kurikulum. Sejalan dengan arah desentralisasi para pakar pendidikan yang bergabung dalam lokakarya nasional (1990) merekomendasikan agar pengelolaan pendidikan dasar dilimpahkan pada Dati II (kabupaten/kota) yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Mendikbud No.0181/U/1996 tentang kebijaksanaan pelaksanaan tahun 1996/1997.

Berdasarkan keputusan Mendikbud No. 0181/U/1996 ada beberapa alasan muncul Desentralisasi Pendidikan, antara lain :

#### 1. Menghindari Beban Pemerintah

Sistem pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan beban menjadi berat berat, yaitu pemerintah pusat. Desentralisasi antara lain dimaksudkan untuk mendistribusikan beban tersebut ke daerah-daerah sehingga beban pemerintah pusat berkurang, pemerintah daerah beserta masyarakat ikut menanggung beban tersebut.

#### 2. Relevansi di Indonesia

Dalam rangka desentralisasi pendidikan, staf pusat perlu dikurangi, kantor wilayah yang merupakan kepanjangan tangan pusat perlu dihapus, kantor pendidikan di tingkat kabupaten / kota lebih bertindak sebagai fasilitator, dan pengelolaan pendidikan diserahkan ke sekolah.

Proporsi anggaran pendidikan yang selama ini 70% untuk pengelolaan di pusat/wilayah hanya 30% untuk sekolah perlu diubah menjadi 10% untuk pengelolaan dan 40% untuk sekolah, sedangkan 50% lainnya untuk fungsi pemerataan bagi sekolah-sekolah yang belum memperoleh alokasi bantuan / subsidi. Kurikulum nasional perlu dirampingkan dan disajikan dalam suatu kerangka yang lebih jelas dengan memuat materi-materi yang dinilai paling esensial untuk dikuasai oleh para siswa. Sementara kurikulum muatan local dijabarkan oleh sekolah. Fungsi pusat lebih mengarah pada penerapan kriteria atau standar untuk mempertahankan mutu dan relevansi pendidikan serta melakukan pemantauan guna memastikan bahwa standar tersebut dilaksanakan oleh daerah atau sekolah.

### 3. Pengaturan perimbangan kewenangan pusat-daerah

Daerah perlu memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Sementara pusat mengurus hal-hal yang bersifat strategis pada tatanan nasional, yaitu pengembangan kurikulum nasional, bantuan teknis, bantuan dana, monitoring, pendidikan bahasa Indonesia, pembakuan mutu, pendidikan moral, dan karakter bangsa serta pemberian kesempatan pendidikan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

### 4. Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Untuk melaksanakan program-programnya sekolah perlu mengundang berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan dunia usaha / industri) untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan.

### 5. Pendayagunaan Bersama Sumber Daya Pendidikan

Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan seiring dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat harus mencegah terjadinya perkembangan yang mengarah pada egoisme sempit dikalangan pengelola dan pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan strategi pendayagunaan sumber daya pendidikan yang spektrumnya bisa antar wilayah, antar sekolah, antar perguruan tinggi, antar sektor, dan bahkan antar pemerintah daerah, keluarga, dan kelompok masyarakat. Strategi ini dapat memberikan manfaat antara lain :

- a) Memungkinkan terjadinya kerjasama yang sinergis antara potensi pendidikan di daerah.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan
- c) Membatasi terjadinya disparitas akses dan mutu yang terlalu besar

- d) Menghidupkan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan

## 6. Hubungan Kemitraan Antar *stakeholders* Pendidikan

Strategi pendayagunaan bersama sumber daya pendidikan perlu dikembangkan menjadi hubungan yang simbiotik antara pemerintah, politisi, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM, dan yayasan-yayasan. Hubungan simbiotik tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan pendidikan.

## 7. Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ada empat dasar yang menopang infrastruktur sosial yang kuat, yaitu : (a) tegaknya moral hukum, (b) diterapkannya kebijakan untuk mengartikulasikan prinsip Bhineka Tunggal Ika, (c) dikembangkannya kebijakan berbasis masyarakat, dan (d) dikembangkannya sektor ekonomi riil.

Berbagai upaya baik dibidang pemerintahan maupun dibidang pendidikan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan. Dibidang pemerintahan, kebijakan yang mendasarinya adalah, UU No.32 Tahun 2004. sedangkan dibidang pendidikan diawali dengan UU No. 20 Tahun 2003. dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004<sup>23</sup> tentang pemerintah daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>23</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2004

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-undang No.2 Tahun 1989 yang sudah tidak memadai lagi perlu diganti dan disempurnakan agar sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

e. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat MBS<sup>24</sup>.

MBS sebagai bentuk otonomi sekolah memotifasi guru untuk *mengubah* paradigma sebagai “*curriculum user*” menjadi “*curriculum developer*”. Guru mampu keluar dari kerja konvensional menjadi kultur kerja yang kontemporer yang dinamis. Guru mampu memainkan peran sebagai “*agent of change*”.

KTSP disusun bersama-sama oleh guru, komite sekolah / pengurus yayasan, konselor (BK) dan narasumber yang disupervisi oleh dinas pendidikan. KTSP ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan kepala dinas pendidikan. KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi atau SI dan standar kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Penyusunan KTSP juga

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Bahan/Materi Bintek KTSP SMA Tingkat Kabupaten/Kota*. Semarang, 2008

harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam Undang-undang No. 20/2003 dan PP 19/2005.

1. Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP 2006.<sup>25</sup>
  - a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
  - b. Beragam dan terpadu.
  - c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
  - e. Menyeluruh dan berkesinambungan.
  - f. Belajar sepanjang hayat.
  - g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
2. Landasan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
  - a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 51 ayat 1.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 49 ayat 1.
  - c. Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standart Isi KTSP.
  - d. Peraturan Mendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standart Kompetensi Lulusan.
  - e. Peraturan Mendiknas No.24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pendidikan Nasional No. 22 dan 23.
3. Tujuan Pengembangan dan Fungsi KTSP Tujuan pengembangan KTSP adalah:

*Pertama* untuk dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan daerah.

*Kedua* sebagai pedoman dalam menentukan standart kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa.

---

<sup>25</sup> Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Media Grafika, Jakarta, 2008, hlm.154

#### 4. Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP

Prinsip-prinsip pengembangan KTSP disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang telah ditentukan, yakni :

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- b. Beragam dan terpadu.
- c. Tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan.
- f. Belajar sepanjang hayat.
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah.

#### 5. Acuan Operasional KTSP 2006<sup>26</sup>

- a. Peningkatan iman dan taqwa dan ahlak mulia
- b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
- c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
- d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- e. Tuntutan dunia kerja
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni
- g. Agama
- h. Dinamika perkembangan global
- i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- j. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- k. Kesetaraan gender
- l. Karakteristik satuan pendidikan

---

<sup>26</sup> Depdiknas, Bahan Materi BinteK KTSP SMA Tingkat Kabupaten Kota, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Semarang, hlm. 15

6. Struktur dan muatan KTSP antara lain:

a. Mata Pelajaran

- 1) Mapel beserta alokasi waktu masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi (SI).
- 2) Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pelajaran perminggu.
- 3) Pemanfaatan empat jam perminggu untuk mapel yang ada atau mapel baru yang dianggap penting.

b. Muatan Lokal

- 1) Berisi tentang muatan lokal yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 2) Mencakup: jenis, mekanisme, pemilihan, jadwal, penyelenggaraan dll.
- 3) Dalam pengembangan programnya memperhatikan sebagai berikut : jenis mulok disesuaikan dengan ciri khas / potensi / keunggulan daerah yang substansinya tidak sesuai menjadi bagian dari mapel lain, atau terlalu substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi mata pelajaran tersendiri.
- 4) Merupakan kegiatan kurikuler yang terstruktur dan tersistem.
- 5) Setiap sekolah dapat melaksanakan mulok lebih dari satu jenis dalam setiap semester.
- 6) Siswa boleh mengikuti lebih dari satu jenis mulok pada setiap semester, sesuai dengan kemampuan sekolah.
- 7) Sekolah harus menyusun SK, KD dan silabus untuk setiap jenis mulok yang diselenggarakan oleh sekolah.

c. Kegiatan Pengembangan Diri

Berisi tentang penjelasan program pengembangan diri yang diselenggarakan oleh sekolah, yang mencakup: jenis kegiatan, mekanisme dan strategi pelaksanaan. Dalam menyusun programnya memperhatikan sebagai berikut :

- 1) Bukan mata pelajaran dan tidak perlu dibuatkan silabus.
  - 2) Penilaian dilakukan secara kualitatif (deskripsi) bukan kuantitatif.
  - 3) Berfungsi sebagai wahana bagi siswa untuk mengekspresikan diri sesuai bakat, minat, dan kebutuhan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
  - 4) Dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelayanan konseling (kehidupan pribadi / sosial, kesulitan belajar, karir), atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kreatifitas / kepribadian siswa seperti : kepramukaan, kepemimpinan, KIR, dll.
  - 5) Perlu dibuat program kerja yang sistematis dan komprehensif sebagai bagian dari program kerja sekolah atau program kerja OSIS.
  - 6) Difasilitasi / dibimbing oleh konselor / guru BK, guru mata pelajaran atau tenaga kependidikan yang kompeten.
7. Pengaturan Beban Belajar
- a. Berisi tentang jumlah beban per mata pelajaran, perminggu, persemester, dan pertahun pelajaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - b. Sekolah dapat mengatur alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun pelajaran sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah beban belajar secara keseluruhan tetap.
8. Ketuntasan Belajar
- a. Berisi tentang kriteria dan mekanisme penetapan ketuntasan minimal per mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
    1. Ketuntasan belajar ideal untuk setiap indikator adalah 0-100%, dengan batas kriteria ideal minimum 75%.

2. Sekolah harus menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) per mata pelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata siswa, kompleksitas, dan sumber daya pendukung.
3. Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah batas kriteria ideal, tetapi secara bertahap harus dapat mencapai kriteria ketuntasan ideal

#### 9. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Berisi tentang kriteria dan mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan serta strategi penanganan peserta didik yang tidak naik atau tidak lulus yang diberlakukan oleh sekolah.

#### 10. Penjurusan

Berisi tentang kriteria dan mekanisme penjurusan serta strategi / kegiatan penelusuran bakat, minat, dan prestasi yang diberlakukan oleh sekolah.

#### 11. Pendidikan Kecakapan Hidup

Berisi tentang penjelasan program kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh sekolah, yang mencakup : jenis program, mekanisme dan strategi pelaksanaannya. Dalam menyusun program memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mencakup kecakapan pribadi, sosial, akademik, dan atau vokasional
- b. Menjadi bagian integral dan atau berupa paket / modul yang direncanakan secara khusus dan terintegrasi.
- c. Dapat diperoleh dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan formal / nonformal lain, apabila sekolah yang bersangkutan tidak memiliki sumber daya pendukung

## 12. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Berisi penjelasan tentang program keunggulan lokal dan global (misalnya : program SBI) yang mencakup jenis mekanisme dan strategi pelaksanaan di sekolah, disusun dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Substansinya mencakup aspek : ekonomi, budaya, bahasa, TIK, ekologi, dll, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
- b. Dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran
- c. Dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan atau satuan pendidikan nonformal

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan yang memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari ke delapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

PERBEDAAN KURIKULUM 2004 DENGAN  
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 2006.

NO	ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM KTSP 2006
1.	filosofi	Kompetensi lulusan	Teori konstruktivisme, bahwa yang ada disekitar kita akan membantu mempercepat untuk mengkonstruksi pemikiran menjadi suatu pengetahuan yang bermakna, prinsip pembelajaran menyenangkan yang terkait dengan bakat dan minat siswa, pembelajaran kontekstual (CTL) pembelajaran yang bermanfaat bagi masa depan, prinsip keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas (MBS)
2.	Tujuan	Agar siswa memiliki semua kompetensi dasar untuk semua mata pelajaran	Keterampilan atau kualitas tertentu yang diharapkan dapat dimiliki atau diubah siswa
3.	Substansi mata pelajaran	Ditentukan sepenuhnya oleh sekolah, pemerintah hanya menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, indi-	Ditentukan dalam standar isi yang meliputi kelompok mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri

		kator pencapaian, dan materi pokok	
4.	Cara pembelajaran	Guru berfungsi sebagai fasilitator sehingga harus memperhatikan kecepatan belajar siswa secara individual	Membentuk pola tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan dan dievaluasi melalui pengukuran dengan tes maupun non tes. Dan proses pembelajaran dilakukan dengan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi.
5.	Cara penilaian	Acuan kriteria yang variabelnya adalah waktu	Untuk mengukur pencapaian kompetensi, menggunakan acuan kriteria menyeluruh, disesuaikan dengan pengalaman belajar yang dilakukan pada kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur

#### f. Kerangka Pemikiran

Dalam pembangunan nasional, pendidikan merupakan salah satu factor yang menentukan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat dan diatur lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31. berbicara tentang masalah pendidikan di Indonesia dalam prespektif masa depan seperti dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut : “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mencapai tujuan dibidang pendidikan, pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya sesuai dengan semangat otonomi pendidikan yang Selanjutnya kebijakan tersebut juga dirumuskan melalui proses pengaturan, pengorganisasian dan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan yang berupa undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasioanal dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi dan No. 23 tentang standar kompetensi lulusan serta Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan 23. Sekolah Menengah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah menengah, pemerintah kota surakarta mengeluarkan kebijakan tentang semua jenjang pendidikan di kota surakarta supaya melaksanakan kurikulum KTSP 2006.

Secara teoritik pelaksanaan kebijakan yang ideal mengandung enam variabel sebagaimana disebutkan oleh Van Mater , Van Horn dan Budi Winarno yaitu sebagai berikut<sup>27</sup> :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
5. kondisi-kondisi ekonomi, sosial

---

<sup>27</sup> Van Mater , Van Horn dan Budi Winarno, *loc.cit*; hlm. 111

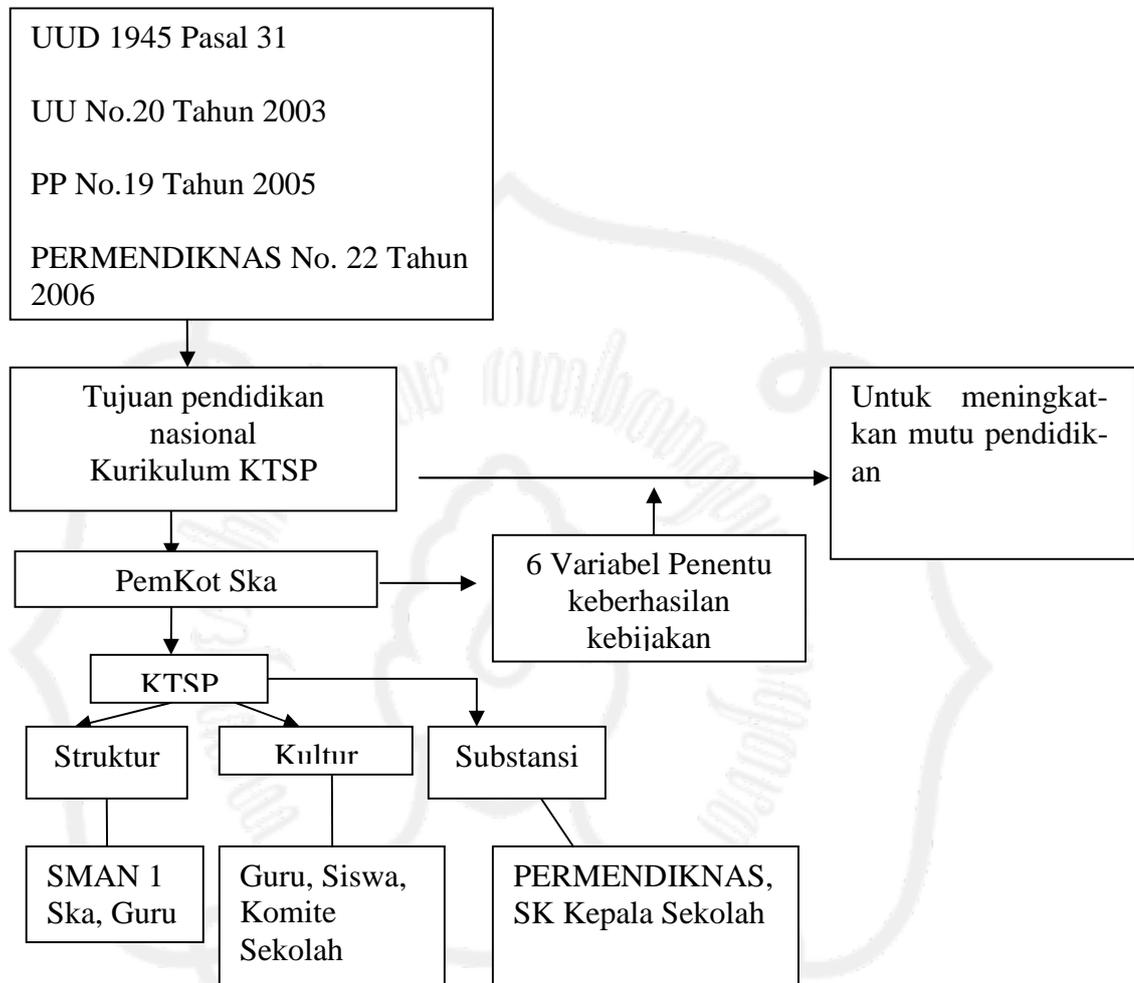
## 6. kecenderungan pelaksanaan (implementers)

Sehubungan dengan variabel pelaksanaan kebijakan di atas, masing-masing kepala sekolah di tingkat pendidikan di tingkat menengah akan berusaha melaksanakan kebijakan dari atasannya. Melihat kondisi kota solo khususnya praktek pelaksanaan ketentuan dari atasan para kepala sekolah masih bersifat *pattern clien*. Maka dengan sendirinya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang ada pada sekolah menengah, misalnya jumlah dan kualitas guru, jenis referensi yang digunakan dan kesiapan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum jelasnya aturan yang memadahi yang disusun dalam sebuah instrumen hukum dalam hal ini adalah keputusan Mendiknas yang hingga ini belum dikeluarkan dasar pijakan pelaksana kurikulum KTSP 2006 untuk semua jenjang pendidikan. Maka sekolah menengah di kota surakarta lebih bersifat menunggu dan tetap melaksanakan kebijakan ditingkat pusat yang didasarkan pada Permendiknas No. 22 tahun 2006.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan dalam sebuah bagan berikut :

Bagan 2



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode yang tepat, maka peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut ini merupakan metode yang digunakan oleh peneliti, yang meliputi :

##### A. Jenis Penelitian

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai penelitian yang akan dilaksanakan, maka untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian metode penelitian hukum terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian hukum. Pengertian hukum adalah bermacam-macam, hukum itu banyak seginya dan meliputi segala macam hal sehingga menyebabkan orang tak mungkin membuat definisi apa sebenarnya hukum itu.

Ilmu yang berusaha menjawab tentang apa itu hukum adalah filsafat hukum, dalam filsafat hukum terdapat berbagai aliran yang ingin memberi pengertian apa itu hukum. Aliran itu misalnya aliran hukum *alam*, aliran *positivistik*, aliran *realisme*, aliran *sociological jurisprudence* dan sebagainya. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dikutip oleh Setiono, maka ada lima konsep hukum yaitu :<sup>28</sup>

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional

---

<sup>28)</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 2

3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcerto* dan tersistemasi sebagai *judge made law*
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang berkembang, eksis sebagai variabel sosial yang empirik
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai dampak dalam interaksi antar mereka

Dari konsep hukum tersebut menurut Setiono konkretnya peneliti akan meneliti yang mana :

- a. Hukum alam
- b. Hukum positif
- c. Putusan hakim
- d. Perilaku sosial yang terlembagakan
- e. Hukum yang ada pada benak manusia

Dalam penelitian ini penulis mendasarkan pada konsep hukum yang kelima yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak dalam interaksi antar mereka (hukum yang ada di benak manusia). Karena dalam penelitian ini penulis ingin menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dan perilaku peristiwa secara langsung yang mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat. Selanjutnya penulis akan menentukan metode yang sesuai dengan hukum yang penulis maksud. Menurut Setiono metode adalah “ alat untuk mencari jawaban. Jadi menggunakan suatu metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan dicari ”. Dengan kata lain menurut Mardalis metode merupakan “ suatu cara atau tehnik yang dilakukan dalam proses penelitian. <sup>29)</sup> Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Dalam penelitian ini penulis mendasarkan pada konsep hukum yang kelima yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak dalam interaksi antar mereka (hukum yang ada di benak

---

<sup>29)</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 24

manusia). Karena dalam penelitian ini penulis ingin menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dan perilaku peristiwa secara langsung yang mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat. Selanjutnya penulis akan menentukan metode yang sesuai dengan hukum yang penulis maksud. Menurut Setiono metode adalah “ alat untuk mencari jawaban. Jadi menggunakan suatu metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan dicari ”. Dengan kata lain menurut Mardalis metode merupakan “ suatu cara atau tehnik yang dilakukan dalam proses penelitian. <sup>30</sup> Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta sehingga konsep hukum yang dipakai adalah konsep hukum yang ke lima, yaitu hukum yang ada pada benak manusia.

Menurut Burhan Ashshofa konsep hukum yang ke lima ini diartikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat. Tipe kajiannya sosiologi atau sosial / non doctrinal dengan pendekatan interaksional / mikro dengan menggunakan analisis-kualitatif . Menurut Burhan Ashshofa ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, antara lain<sup>31</sup> :

---

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 24

<sup>31</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

1. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi focus penelitian.
2. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera (mata, telinga, penciuman, alat perasa), sedangkan gagasannya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan. Keberadaan suatu gejala dapat dibuktikan dengan menghitung kehadirannya, sedangkan keberadaan suatu gagasan dapat dibuktikan dengan cara memperhatikan pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari gagasan yang bersangkutan.
3. Makna yang ingin dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai suatu sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut

Kajian yang bersifat empiris seperti yang dikemukakan tersebut merupakan sebuah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain yang dideskripsikan dan diberikan suatu penilaian atau disebut juga kajian deskriptif evaluatif. Namun demikian untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini dilakukan pula penelitian yuridis, normatif sebagai penunjang dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ingin dikaji.

## B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis melaksanakan penelitian di SMA kota surakarta. Adapun alasan dilaksanakannya penelitian di lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Instansi-instansi terkait di Kota Surakarta (DIKPORA, Kepala Sekolah, Komite, Guru) sebagai sumber memperoleh data dimungkinkan sekali memberikan data yang diperlukan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

- 2) Sehubungan dengan dilaksanakannya otonomi pendidikan dan desentralisasi pendidikan, beberapa sekolah menengah atas yang ada di Kota Surakarta mulai tahun ajaran 2008/2009 sudah melaksanakan Kurikulum KTSP 2006, dan hal ini merupakan dasar pemikiran bagi Reformasi Pendidikan untuk mengkaji implementasi dari kebijakan tersebut.

### C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*Primary data atau basic data*) adalah data yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber dimana penelitian berlangsung. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh dari *stakeholders* yang berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dalam rangka pelaksanaan kurikulum KTSP 2006 pada Sekolah Menengah di kota Surakarta.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keseluruhan keterangan dari hasil wawancara pada pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah surakarta, dan

instansi-instansi terkait di kota surakarta sebagai sumber data penelitian ini, antara lain :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas pendidikan pemuda dan olahraga sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris daerah.

2. Kasubdin Bina Program DIKPORA

- a) Seksi perencanaan
- b) Seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan

3. Kasubdin Sekolah Menengah DIKPORA

- a) Seksi pendidikan
- b) Seksi sarana pra sarana
- c) Seksi tenaga tehnis dan non tehnis

4. Kepala Sekolah Menengah

Kepala sekolah bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DIKPORA sebagai atasan dan bertanggung jawab langsung kepada DIKPORA dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan secara langsung Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Singkat Satuan Pendidikan (KTSP)

5. Guru / Pengajar di Sekolah Menengah atas

Sebagai pelaksana kebijakan dari kepala sekolah dalam kegiatan belajar mengajar untuk melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

6. Siswa / Peserta didik di Sekolah Menengah atas

Merupakan obyek dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer.

### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan semua bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum yang akan digunakan antara lain :

- a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
- b) Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945
- c) Peraturan perundang-undangan yang meliputi undang-undang, atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain

- a) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- b) Hasil penelitian hukum
- c) Hasil penelitian terdahulu yang relevan

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, seperti :

- a) Artikel
- b) Makalah
- c) Jurnal

## E. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya terdiri dari Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta di kota Surakarta yang terdiri dari 4 Sekolah Negeri dan 2 Sekolah Swasta yang berjumlah 6 sekolah. Sedangkan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sampel probabilitas atau sampel secara random dengan menggunakan tehnik random atas dasar strata, dimana populasi distratakan terlebih dahulu, stratanya disesuaikan dengan sifat-sifat dan ciri-ciri suatu populasi. Strata tersebut bisa dalam arti horizontal maupun vertikal.

Dari keseluruhan populasi yang berjumlah 6 sekolah negeri maupun swasta dibagi dalam 3 (tiga) strata yaitu kelas Atas, kelas Menengah, dan kelas Bawah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kelas Atas, dikategorikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana, sistem administrasi yang teratur, prestasi sekolah dan lain-lain yang dimiliki oleh setiap sekolah
2. Kelas Menengah, dikategorikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana sistem administrasi yang teratur, prestasi sekolah, dll yang tingkatannya dibawah kelas atas
3. Kelas Bawah, dikategorikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana, sistem administrasi yang teratur, prestasi sekolah, dll yang tingkatannya dibawah kelas atas dan kelas menengah

Mengenai jumlah sampel untuk masing-masing jumlah strata, dapat ditetapkan secara proporsional yang diambil 6 sekolah dengan perincian sebagai berikut :

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah warga strata</b>	<b>Perbandingan</b>
Kelas Atas	SMAN 3 SKA SMAN 1 SKA                    2	33,3
Kelas Menengah	SMAN 5 SKA SMAN 2 SKA                    2	33,3
Kelas Bawah	SMA WARGA SKA    2 SMA KRISTEN 2 SKA	33,3
Total	6	100

Dengan sampel berjumlah 6 sekolah, maka untuk masing-masing kelas strata dapat diambil responden (sekolah) sejumlah :

Kelas Atas =  $33,3 \times 6 = 2$  sekolah

Kelas Menengah =  $33,3 \times 6 = 2$  sekolah

Kelas bawah =  $33,3 \times 6 = 2$  sekolah

---

Jumlah = 6 sekolah

Tehnik pengambilan sampel dengan cara demikian disebut “tehnik sampling secara random atas dasar strata yang proporsional” (*proporsional stratified random sampling*). Berikut ini nama-nam sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu :

1. SMA Negeri 3 Surakarta
2. SMA Negeri 1 Surakarta
3. SMA Negeri 5 Surakarta
4. SMA Negeri 2 Surakarta
5. SMA Warga Surakarta
6. SMA Kristen 2 Surakarta

#### F. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan tehnik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai referensi pendukung seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang ingin diteliti
2. Observasi, yaitu melihat dari dekat obyek penelitian sehingga nantinya kita dapat mengetahui secara langsung terhadap masalah yang akan dibahas baik secara teoritis maupun dalam keadaan yang ada di lapangan
3. Interview (wawancara), yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Interview tersebut dapat dibedakan menjadi :

1. Interview langsung, Menurut Burhan Ashshofa di dalam tehnik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar yaitu<sup>32</sup> :

a) Wawancara Berencana (berpatokan)

Sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan

b) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan diri pertanyaan yang akan diajukan tetapi, peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adlah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Jenis wawancara yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), dimana wawancara didasarkan pada pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan, dan akan sangat berguna bagi pewawancara supaya tidak kehabisan pertanyaan. Selain itu jenis wawancara ini sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara berencana (berpatokan), dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang diajukan pada responden. Wawancara

---

<sup>32</sup> *Ibid*; hlm. 96

dalam penelitian ini dilakukan pada : kepala sekolah negeri, swasta, di Surakarta yang menjadi responden.

- 2 Interview tidak langsung, yaitu dengan menggunakan kuisisioner. Menurut Sanafaih Faisal mengungkapkan bahwa “ angket atau kuisisioner merupakan pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang tertulis di susun dan disebarakan untuk mendapatkan informasi keterangan dari sumber daya orang ”. <sup>33</sup> Jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang bersifat tertutup dan terbuka. Angket yang bersifat tertutup dimaksudkan untuk mengetahui berapa prosentase jawaban dari responden sedangkan angket yang bersifat terbuka dimaksudkan untuk menjabarkan permasalahan yang ada. Angket tersebut ditujukan bagi sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta yang diambil sebagai sampel. Untuk lebih jelasnya item angket dapat dilihat pada lampiran.

#### G. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sering merupakan bagian yang paling sulit bagi kebanyakan peneliti. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model “*interactive models of analysis*”, dimana peneliti bergerak diantara keempat komponen, selama proses pengumpulan data berlangsung, bergerak di antara data reduction, data display, dan concluding drawing sesudah pengumpulan data” (H. B. Sutopo) Ketiga bentuk analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : <sup>34</sup>

1. Data *reduction* (reduksi data).

Merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan

---

<sup>33</sup> Sanafaih Faisal, *Dasar dan Tehnik Menyusun Angket*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 2

<sup>34</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Perss, Surakarta, 2002, hlm. 84

tertulis dilapangan. Proses ini terjadi terus menerus mulai dari tahap awal sampai laporan akhir penelitian

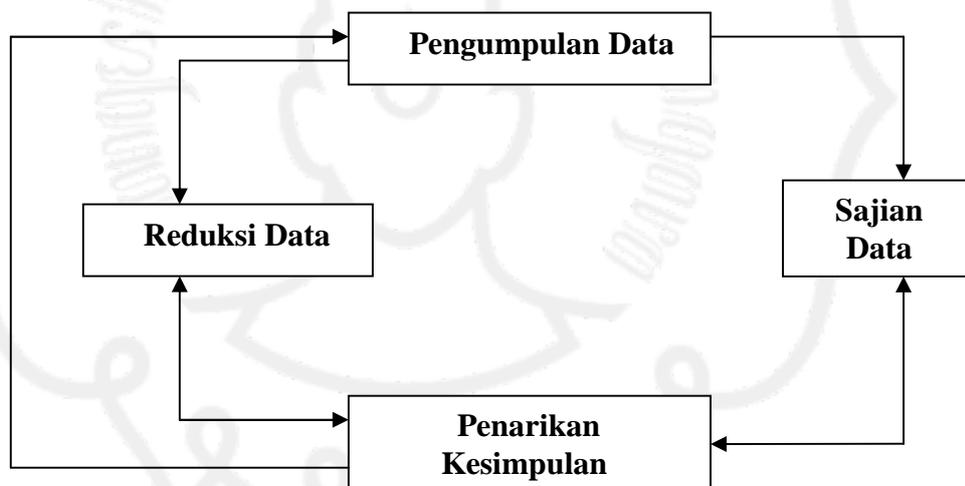
2. *Data display* (penyajian data)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, dapat diketahui apa yang terjadi dan kemungkinan untuk menganalisis dan mengambil tindakan.

3. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Dari sajian data yang telah tersusun, selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

Berdasarkan ketiga analisis data tersebut menurut H. B. Sutopo, apabila digambarkan sebagai berikut :<sup>35</sup>



Bagan 3  
Analisis Kualitatif Model Interaktif

Dalam menganalisisnya ketiga komponen tersebut akan beraktifitas dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini penelitian tetap berada dalam lingkungan interaksi tersebut sampai proses

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.87

pengumpulan data berlangsung, mulai dari pengumpulan data bergerak kereduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan waktu yang ada.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah sebuah organisasi yakni organisasi sekolah yang terkait sebagai unsure pelaksana kebijakan Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dianalisis berdasarkan 6 variabel pelaksanaan kebijakan yang ideal. Tehnik anaslisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan pendekatan makro yang digambarkan tabulasi table tunggal.

Dari data yang tercantum dalam tabel kemudian dilakukan interpretasi dengan cara melihat kecenderungan prosentase yang terdapat dalam setiap tabel tersebut. Dengan interpretasi tersebut, maka akan ditemukan jawaban terhadap perumusan masalah yang akan diteliti untuk lebih jelasnya digambarkan seperti tabel di bawah ini:

No	Jenis Item soal	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	A	2	49,1 %
2	B	2	16,6 %
3	C	2	13,3 %
	Total	6	100 %

Adapun kategori yang diajukan sebagai indikator item dalam pembuatan pertanyaan dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Permendiknas No 22 tahun 2006 Tentang KTSP
2. Tujuan pelaksanaan Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP)
3. Pelaksanaan kebijakan Permendiknas No.22 Tahun 2006
4. Sasaran dan fokus Permendiknas No.22 Tahun 2006
5. Tujuan perumusan kebijakan pemerintahan kota dalam pelaksanaan KTSP

6. Kesesuaian antara Permendiknas No.22 Tahun 2006 dengan otonomi pendidikan
7. Kesiapan sekolah dalam melaksanakan KTSP
8. Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan KTSP
9. Sumber penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan
10. Sistem monitoring dari DIKPORA untuk tindak lanjut pelaksanaan KTSP
11. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KTSP dalam meningkatkan mutu pendidikan

#### H. Validasi Data

Validasi data diperoleh dengan menggunakan triangulasi data yaitu mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data dengan teknik yang berbeda, sehingga kebenarannya dapat dipercaya. Didalam Lexy J. Moleong Densim membedakan triangulasi menjadi 4 teknik yaitu “ triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi penyelidikan ”.<sup>36</sup>

Berdasarkan 4 macam triangulasi tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data atau sumber yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan yang prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan

---

<sup>36</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm. 24.

- e. Membandingkan hasil suatu wawancara dengan isi dokumen yang selalu berkaitan.

Dengan menggunakan triangulasi data maka hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan teruji validitasnya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### A. Diskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Umum Kota Surakarta

Kota surakarta merupakan salah satu kota besar di Propinsi Jawa Tengah, yang terletak dibagian tengah Kota / Kabupaten Karisidenan Surakarta. Berdasarkan monografi kotamadya surakarta tahun 2003 yang diperoleh dari data badan statistik Kota Surakarta dalam tahun 2003 dijelaskan bahwa : Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal Kota Solo merupakan dataran rendah dengan ketinggian kira-kira 92 meter, luas wilayah 4.404,06 Terletak pada 110 45' 35'' Bujur Timur dan antara 7 36' Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>37</sup> :

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1) Sebelah utara   | : Kabupaten Boyolali    |
| 2) Sebelah timur   | : Kabupaten Karanganyar |
| 3) Sebelah selatan | : Kabupaten Sukoharjo   |
| 4) Sebelah barat   | : Kabupaten Sukoharjo   |

Secara administratif kota surakarta terbagi dalam lima kecamatan, yaitu : Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan. Kecamatan terluas ditempati oleh Kecamatan Banjarsari dengan luas mencapai 33,63 % dari luas Kota Surakarta.

##### 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

##### Sekolah Menengah Atas Surakarta

Pengertian, Karakteristik, dan Tujuan

---

<sup>37</sup> ( BPS, 2003 : 29 )

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah atas Surakarta, diindikasikan dengan adanya kegiatan belajar mengajar yang mampu membentuk pola tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi melalui pengukuran dengan menggunakan tes dan non tes. Proses pembelajaran akan efektif apabila dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan baik, supaya :

- a. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- b. Mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dunia global
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat global

Kurikulum operasional sebagai kurikulum yang bersifat operasional dalam pengembangannya tidak akan lepas dari ketetapan-ketetapan yang telah disusun pemerintah secara rasional. Artinya walaupun daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum akan tetapi kewenangan itu hanya sebatas pada penyelenggaraan operasionalnya saja, sedangkan yang menjadi rujukan pengembangannya itu sendiri ditentukan oleh pemerintah, misalnya jenis mata pelajaran beserta jumlah jam pelajarannya, isi dari setiap mata pelajaran itu sendiri serta kompetensi yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran itu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Daerah dalam menentukan isi pelajaran terbatas pada pengembangan kurikulum muatan lokal yakni yang memiliki kekhasan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta aspek pengembangan diri yang sesuai dengan minat siswa. Jumlah jam pelajaran kedua aspek tersebut ditentukan oleh pemerintah.

Sebagai kurikulum operasional, para pengembang KTSP dituntut harus memperhatikan ciri khas kedaerahan, sesuai dengan bunyi Undang-undang No.20 Tahun 2003 Ayat 2, yakni bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Persoalan ini penting untuk dipahami, sebab walaupun standar isi ditentukan oleh pemerintah akan tetapi dalam operasional pembelajarannya yang direncanakan dan dilakukan oleh guru dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari keadaan dan kondisi daerah misalnya ketika standar isi mengharuskan siswa mempelajari masalah transportasi maka para pengembang KTSP di suatu daerah akan berlainan dengan daerah lain. Pengembang KTSP di Jawa misalnya akan mengembangkan isi kurikulum tentang transportasi darat sedang di Kalimantan akan banyak membahas transportasi air atau sungai. Dengan demikian walaupun topik yang dikaji mungkin sama secara nasional akan tetapi materi atau isi dari topik tersebut akan berbeda.

Sebagai kurikulum operasional para pengembang kurikulum di daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum menjadi unit-unit pelajaran, misalnya dalam pengembangan strategi dan metode pembelajaran, dalam menentukan media pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan termasuk dalam menentukan berapa kali pertemuan dan kapan suatu topik materi harus dipelajari siswa agar kompetensi dasar yang telah ditentukan dapat tercapai.

Dilihat dari desainnya kurikulum terdiri atas empat desain yakni desain kurikulum disiplin ilmu yang dikenal dengan kurikulum subyek akademis, kurikulum pengembangan individu yang dikenal dengan kurikulum humanistik, kurikulum berorientasi pada kehidupan masyarakat yang dikenal dengan konstruksi sosial serta kurikulum tehnologis. Sehubungan dengan konsep dasar dan desain kurikulum itu maka KTSP memiliki semua unsur tersebut yang sekaligus merupakan karakteristik KTSP itu sendiri, yakni :

*Pertama* dilihat dari desainnya KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu hal ini dapat dilihat dari struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, setiap mata pelajaran harus dipelajari sesuai dengan nama-nama disiplin ilmu juga ditentukan jumlah jam pelajaran secara ketat. Criteria keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari sistem kelulusan yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi pelajaran seperti yang diukur dari hasil Ujian Nasional. Soal-soal dalam UN itu lebih banyak menguji kemampuan kognitif siswa dalam setiap mata pelajaran, walaupun, dianjurkan setiap guru menggunakan sistem penilaian proses misalnya dengan portofolio, namun pada akhirnya kelulusan siswa ditentukan oleh sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran.

*Kedua* KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang menekankan pada aktifitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi

pelajaran melalui berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang disarankan misalnya melalui CTL, inkuiri, pembelajaran portofolio dan lain sebagainya. Secara tegas dalam struktur kurikulum terdapat komponen pengembangan diri yakni komponen yang menekankan pada aspek pengembangan minat dan bakat siswa.

*Ketiga* KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yakni berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, maka KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Bahkan dengan program muatan lokalnya KTSP didasarkan pada keberagaman kondisi, sosial, budaya yang berbeda masing-masing daerah.

*Keempat* KTSP merupakan kurikulum tehnologis hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi, kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Dilihat dari karakteristik di atas maka KTSP adalah kurikulum yang memuat unsur desain kurikulum. Namun demikian walaupun semua unsur desain mewarnai KTSP akan tetapi desain KTSP sebagai desain kurikulum berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu atau desain kurikulum subyek akademis tampak lebih dominan. Hal ini tampak jelas dari pengaturan secara ketat nama-nama disiplin ilmu serta kriteria keberhasilan setiap siswa dalam mempelajari kurikulum. Dengan demikian manakala digambarkan dalam sebuah pohon akar KTSP adalah desain kurikulum disiplin ilmu, sedang desain kurikulum berorientasi kehidupan masyarakat, desain kurikulum pengembangan individu serta desain tehnologis hanya berupa cabang-cabang yang tidak terlepas dari pohon disiplin ilmu

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan. Dengan demikian melalui KTSP diharapkan dapat

mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Seperti kita ketahui, dalam model pengelolaan kurikulum yang tersentralistik seperti kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia seluruh keputusan pengembangan kurikulum diatur dan ditentukan secara terpusat. Sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan secara nasional hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum itu sendiri. Guru-guru tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum baik dalam tataran ideal maupun dalam tataran operasional, selain melaksanakan kurikulum yang sudah jadi. Akibatnya apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya di setiap sekolah atau daerah adalah sama. Oleh karena itulah dalam proses pengembangan kurikulum setiap unsur sekolah menjadi pasif. Tidak demikian dengan KTSP, sesuai dengan otonominya KTSP memberikan kesempatan kepada sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan di setiap satuan pendidikan akan menjadi lebih bermakna untuk mempersiapkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang berguna mengembangkan potensi daerahnya. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemandirian setiap sekolah dalam menggali dan memanfaatkan potensi dan sumber daya akan menentukan kualitas sekolah yang bersangkutan. KTSP sebagai kurikulum operasional memberikan kesempatan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah dan sesuai dengan karakteristik sekolah. Untuk itulah sekolah dituntut melakukan inisiatif dalam menggali secara mandiri berbagai potensi dan sumber daya untuk mendukung program sekolah termasuk kurikulum yang dikembangkannya. Dengan demikian setiap komponen sekolah baik kepala sekolah maupun guru-guru dituntut untuk lebih aktif dan kreatif melakukan berbagai upaya agar semua kebutuhan sekolah terpenuhi.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama pada kurikulum-kurikulum sebelumnya sekolah hanya berfungsi melaksanakan kurikulum yang telah disusun secara terpusat. Sekolah apalagi masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum, akibatnya peran sekolah terlebih lagi masyarakat sangat terbatas. Tidak demikian dengan KTSP sebagai kurikulum operasional, KTSP menuntut keterlibatan masyarakat secara penuh, sebab tanggung jawab pengembangan kurikulum tidak lagi berada di pemerintah, akan tetapi di sekolah, sedangkan sekolah akan berkembang manakala ada keterlibatan masyarakat.
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sekolah dengan KTSP nya tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum yang telah diatur pusat, akan tetapi juga sebagai pengambil keputusan tentang pengembangan dan implementasi kurikulum. Melalui KTSP diharapkan setiap sekolah atau satuan pendidikan akan berlomba dalam menyusun program kurikulum sekaligus berlomba dalam mengimplementasikannya. Dengan demikian akan tercipta persaingan antar sekolah menuju pencapaian kualitas pendidikan.

Tujuan pendidikan menengah atas adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Pengembangan KTSP didasarkan pada dua landasan pokok yakni landasan empiris dan landasan formal. Yang menjadi landasan empiris di antaranya adalah *pertama* adanya kenyataan rendahnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sudut proses maupun hasil belajar. Dari sudut proses misalnya pendidikan kita kurang mampu mengembangkan peserta didik secara utuh. Proses pendidikan cenderung berorientasi hanya pada pengembangan kognitif atau intelektual, sedang pengembangan sikap dan psikomotor cenderung terabaikan. Melalui

KTSP sebagai kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mendorong proses pendidikan hanya berfokus pada pengembangan intelektual saja, akan tetapi juga pembentukan sikap dan keterampilan secara seimbang yang dapat direfleksikan dalam kehidupan nyata. *Kedua* Indonesia adalah negara yang sangat luas yang memiliki keragaman sosial, budaya dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Selama ini kurikulum bersifat sentralistik cenderung mengabaikan potensi dan kebutuhan daerah yang berbeda itu akibatnya lulusan pendidikan tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan daerah dimana siswa tinggal. KTSP sebagai kurikulum yang cenderung bersifat desentralistik memiliki prinsip berorientasi pada kebutuhan dan potensi daerah. Artinya keanekaragaman daerah baik dilihat dari sosial, budaya dan kebutuhan harus dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum. *Ketiga* selama ini peran sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum bersifat pasif. Sekolah hanya berfungsi untuk melaksanakan kurikulum yang disusun oleh pusat yang kemudian berimbas pada kurangnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program sekolah. KTSP sebagai bentuk kurikulum desentralistik menuntut peran aktif aktif masyarakat, sebab KTSP di susun dan dirancang oleh sekolah dan masyarakat, sehingga berbagai keputusan sekolah tentang pengembangan kurikulum beserta pengimplementasiannya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Yang menjadi landasan formal KTSP disusun dalam rangka memnuhi amanat yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah. dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan PP di atas. Selanjutnya secara teknis

penyusunan KTSP berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Terdapat sejumlah pasal yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 No. 2003 adalah pasal 1 ayat 19; pasal 18 ayat 1, 2, 3 dan 4; pasal 32 ayat 1, 2, dan 3; pasal 36 ayat 1, 2, 3, dan 4; pasal 37 ayat 1, 2, 3; pasal 38 ayat 1 dan 2. Pasal-pasal yang terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah pasal 1 ayat 5, 13, 14; pasal 5 ayat 1, dan 2; pasal 6 ayat 6; pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8; pasal 8 ayat 1, 2, dan 3; pasal 10 ayat 1, 2, dan 3; pasal 11 ayat 1, 2, 3, dan 4; pasal 13 ayat 1, 2, 3, dan 4; pasal 14 ayat 1, 2, dan 3; pasal 16 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5; pasal 17 ayat 1, 2; pasal 18 ayat 1, 2, 3, dan pasal 20.

Dibawah ini bunyi pasal-pasal yang berkaitan secara langsung dengan penyusunan KTSP dari produk hukum baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Pasal dari undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terkait secara langsung dengan penyusunan KTSP di antaranya :

**Pasal 1 Ayat 19**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

**Pasal 36 Ayat 2 dan 3**

Ayat 2: kurikulum pada suatu jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

Ayat 3: kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : peningkatan iman dan taqwa, peningkatan ahlak mulia, peningkatan

potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungannya, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan IPTEK, agama, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan

#### Pasal 37 Ayat 1

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan muatan lokal.

#### Pasal 38 Ayat 2

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan kabupaten / kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terkait dengan penyusunan KTSP di antaranya:

#### Pasal 1 Ayat 5, 13, 14, dan 15

Ayat 5: Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Ayat 13: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Ayat 14: Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Ayat 15: Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing pendidikan.

#### Pasal 5 ayat 1 dan 2

Ayat 1: Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Ayat 2: Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban ajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan / akademik.

#### Pasal 6 Ayat 6

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum kejuruan dan khusus pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran IPTEK, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata jasmani, olahraga dan kesehatan.

#### Pasal 8 Ayat 1 dan 2

Ayat 1: Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat / semester sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Ayat 2: Kompetensi terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.

#### Pasal 16 Ayat 1

Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

#### Pasal 17 Ayat 1 dan 2

Ayat 1: Kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA atau yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

Ayat 2: Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi Dinas Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan departemen yang menangani urusan pemerintahan.

#### Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur melalui suatu proses dari implementasi kebijakan tersebut sehingga implementasi merupakan suatu proses yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan yang telah dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu atau dengan kata lain suatu kebijakan tidak akan berhasil jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan bukanlah merupakan hal yang sederhana karena bagaimanapun juga pada tataran pelaksanaan sebuah kebijakan didalamnya terkait banyak berbagai dimensi, mulai dari interpretasi, organisasi, dukungan sumber daya dan sumber dana serta mentalitas budaya dari masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada permasalahan pelaksanaan kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah guna mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah di segala bidang. Selain itu juga ditempuh strategi untuk meningkatkan peran lembaga pendidikan termasuk yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan formal dan pendidikan di luar sekolah guna memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kerukunan, toleransi, rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peduli terhadap kebudayaan daerah. Pelaksanaan pendidikan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa melibatkan masyarakat secara luas, untuk itu dilakukan juga

strategi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat termasuk lembaga pendidikan non formal yang strategis. Pembangunan pendidikan di kota surakarta, selama ini telah meningkatkan pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut mengacu pada berbagai peraturan perundangan dan berbagai kebijakan yang terkait dengan bidang pendidikan. Dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan berupa undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 56 Tahun 1998 tentang pendidikan menengah.

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta telah disusun dengan mengoptimalkan sumber daya dan dukungan "*Stakeholders*" yang ada. Dalam penyusunan kurikulum KTSP sengaja disusun secara team diolah secara bersama-sama dengan harapan dapat di pahami secara bersama-sama, sehingga pada pelaksanaan kurikulum ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kurikulum acuan atau dokumen suatu sekolah yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah yang ada dan merupakan momentum penting perjalanan sekolah dalam mempersiapkan peserta didik guna meningkatkan mutu dan mendapatkan keunggulan kompetitif lokal maupun global.

Kurikulum sekolah ini akan selalu dikembangkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memenuhi tuntutan masyarakat yang makin tinggi terhadap hasil pendidikan. Oleh karenanya kurikulum ini selalu dikaji dan diperbaiki sehingga kurikulum ini selalu dapat mengikuti perkembangan pendidikan baik secara nasional maupun secara global. Didalam kurikulum ini belum dikembangkan cara pembelajaran secara maksimal dan disesuaikan dengan pengembangan silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran, namun demikian di waktu-waktu yang akan datang selalu diperbaiki dan disempurnakan guna memperoleh formulasi pembelajaran yang lebih baik.

Semua sekolah menengah atas baik yang berstatus negeri maupun swasta sudah melaksanakan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP serta melaksanakan kebijakan dari atasannya. Melihat kondisi kota solo khususnya praktek pelaksanaan ketentuan dari atasan para kepala sekolah masih bersifat *Pattern Klien*, maka dengan sendirinya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang ada pada sekolah menengah misalnya jumlah dan kualitas guru, jenis referensi yang digunakan dan kesiapan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum jelasnya aturan yang memadahi yang disusun dalam instrument hukum dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang hingga saat ini belum dikeluarkan sebagai dasar pijakan pelaksanaan KTSP untuk semua jenjang pendidikan sehubungan dengan hal tersebut sekolah menengah atas di surakarta lebih bersifat menunggu dan tetap melaksanakan kebijakan di tingkat pusat. Berikut ini merupakan deskripsi secara umum hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang KTSP di Sekolah Menengah Atas kota Surakarta yang dihasilkan dari wawancara dan pengisian angket oleh responden yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta yang diwakili oleh Wakasek Bidang Kurikulum yaitu Bp. Drs. Suryadi, Mpd menyatakan bahwa :<sup>38</sup>

*SMA Negeri 1 Surakarta sebagai sekolah percontohan dari pelaksanaan Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan tujuan untuk memahami meningkatkan mutu pendidikan, melaksanakan otonomi pendidikan, desentralisasi pendidikan daerah, deversifikasi kurikulum dalam dunia pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Surakarta dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah mengadakan*

---

<sup>38</sup> Wawancara, Suryadi

*komunikasi dengan dinas terkait, kerja sama dengan komite sekolah sebagai sumber penunjang dalam hal pendanaan secara material dan sarana dan prasarana serta kerja sama antara guru dan siswa agar dapat berhasil dengan baik.*

Penjelasan yang diberikan oleh Bp. Drs. Suryadi, Mpd juga dibenarkan oleh pihak sekolah swasta dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMA Warga Surakarta yaitu Ibu. Dra CH. Titik Purwanti menyatakan bahwa :<sup>39</sup>

*Setelah dikeluarkannya Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang KTSP di semua jenjang pendidikan sekolah menengah harus melaksanakannya namun dalam pelaksanaannya pemerintah kurang memperhatikan kemampuan serta kondisi sekolah swasta yang serba terbatas. Kenyataan ini menimbulkan kecemburuan antara sekolah negeri dan swasta dimana sekolah swasta merasa di anak tirikan oleh pemerintah misalnya permasalahan dana tergantung dari kemampuan yayasan dalam mendanai semua kegiatan sekolah. Tetapi dalam pelaksanaan KTSP sasaran atau fokus utamanya untuk meningkatkan mutu pendidikan otonomi pendidikan, diversifikasi kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.*

Dari penjelasan yang diberikan oleh pihak sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta tersebut maka terlihat jelas bahwa pada hakikatnya Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP sudah dilaksanakan oleh sekolah menengah atas di surakarta. Untuk lebih mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara, berikut ini merupakan hasil pengisian angket yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP, yaitu :

Tabel 1. Pengetahuan terhadap Permendiknas No. 22 tahun 2006 Tentang pelaksanaan KTSP

No	Jenis Item tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Mengetahui	6	100 %
2	Cukup Tahu	0	0 %
3	Tidak Tahu	0	0%

<sup>39</sup> Wawancara, Titik Purwanti

	Total	6	100 %
--	-------	---	-------

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Dari keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 100 % menjawab mengetahui hal ini membuktikan bahwa Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP telah di sosialisasikan dengan baik sehingga sasaran dan fokus kebijakan yang di buat telah tepat pada obyek yang dituju.

Tabel 2. Tujuan dilaksanakannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Surakarta

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Sudah	6	100 %
2	Belum	0	0 %
3	Tidk menjawab	0	0%
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 100 % menjawab sudah mengetahui. Hal ini membuktikan bahwa tujuan dilaksanakannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah diketahui oleh seluruh Sekolah Menengah Atas di Surakarta.

Tabel 3. pemahaman sekolah tentang dikeluarkannya Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP.

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Memahami Sepenuhnya	6	100 %
2	Cukup Memahami	0	0 %
3	Tidak Memahami	0	0%
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 100 % menjawab memahami. Hal ini membuktikan bahwa semua sekolah memahami sepenuhnya di keluarkannya Permendiknas No. 22 tahun 2006 Tentang KTSP. Dan berusaha untuk melaksanakannya.

Tabel 4. Sasaran atau fokus Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Meningkatkan mutu pendidikan	6	100 %
2	Meningkatkan daya serap peserta didik	0	0 %
3	Meningkatkan daya tampung siswa	0	0%
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 100 % menjawab Meningkatkan mutu pendidikan Hal ini membuktikan bahwa semua sekolah mengetahui tujuan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah untuk Meningkatkan mutu pendidikan.

Tabel 5. Tujuan perumusan kebijakan pemerintah kota surakarta dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah dalam rangka otonomi pendidikan, desentralisasi pendidikan serta diversifikasi kurikulum dalam dunia pendidikan.

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Otonomi Pendidikan, desentralisasi pendidikan	0	0 %
2	Diversifikasi kurikulum dalam dunia pendidikan	0	0 %
3	Jawaban 1 dan 2	6	100 %
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 100 % menjawab Otonomi Pendidikan, desentralisasi pendidikan serta Diversifikasi kurikulum dalam dunia pendidikan hal ini terbukti bahwa sejalan dengan jiwa otonomi pendidikan yang memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengatur urusan daerah termasuk masalah pendidikan dan deversifikasi kurikulum dalam dunia pendidikan merupakan perumusan kebijakan dari pemerintah kota surakarta sebagai tindak lanjut adanya otonomi pendidikan dan desentralisasi pendidikan sekaligus dengan adanya deversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman.

Tabel 6. Kesesuaian kebijakan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP sesuai dengan otonomi pendidikan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah :

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Sesuai	5	83,4 %
2	Belum Sesuai	1	16,6 %
3	Tidak sesuai	0	0%
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 5 Sekolah atau sebesar 66,7 % menjawab sesuai dengan otonomi pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sedang 1 sekolah atau sebesar 33,3 % menjawab belum sesuai dengan otonomi pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan alasan bahwa adanya sistem online otonomi pendidikan tidak diberikan sepenuhnya kepada sekolah, masih adanya campur tangan dari pihak lain sehingga perlu memperoleh persepsi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Tabel 7. Kesiapan sekolah dalam melaksanakan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) :

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Siap	5	83,4%
2	Cukup Siap	1	16,6%
3	Tidak Siap	0	0%
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 5 Sekolah atau sebesar 66,7 % menjawab siap melaksanakan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sedang 1 sekolah atau sebesar 33,3 % menjawab cukup siap dengan alasan secara umum kita siap tetapi belum 100 % karena baru kurang lebih 75 % guru mau memahami tentang Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Tabel 8. Kegiatan yang dilakukan pihak sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi guru dan siswa:

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Melakukan sosialisasi dan kegiatan lain yang menunjang	6	100 %
2	Mengadakan komunikasi dengan dinas terkait	0	0 %
3	Tidak ada sama seklaai	0	0 %
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dari penelitian ini 100 % telah melakukan sosialisasi dan kegiatan penunjang lain seperti workshop, seminar baik bersifat lokal maupun nasional yang diselenggarakan oleh instansi terkait sebagai upaya tindak lanjut pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan tentunya diimbangi dengan kegiatan monitoring dengan dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah terlihat serius dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang difokuskan untuk guru dan siswa merupakan langkah awal yang akan menentukan keberhasilan dari kebijakan yang sedang dijalankan, sehingga apabila mengalami hambatan atau permasalahan akan segera ditemukan pemecahannya.

Tabel 9. Sumber penunjang yang paling dominan untuk keberhasilan implementasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP :

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Dana secara material	0	0 %
2	Sarana dan prasarana	0	0 %
3	Kedua-duannya	6	100 %
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sumber penunjang yang paling dominan untuk keberhasilan implementasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang KTSP adalah dana secara material dan sarana dan prasarana. Jadi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya membutuhkan dana dan sarana prasarana baik secara materiel maupun non materiel, untuk menentukan keberhasilan kebijakan yang telah dirumuskan.

Tabel 10. Sistem monitoring yang dilakukan oleh Dikpora untuk tindak lanjut dari pelaksanaan KTSP 2006 :

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Ada	5	83,4 %
2	Tidak Ada	1	16,6 %
3	Tidak Menjawab	0	100 %
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sistem monitoring sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP hal ini telah dijawab oleh 5 sekolah atau sebesar 83,4 %. Sedangkan sisannya menjawab tidak ada kegiatan monitoring sebesar 16,6 % atau 1 Sekolah. Sistem monitoring ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antar organisasi dan pelaksana kebijakan walaupun tidak terus menerus bahkan ada yang hanya satu semester 2 kali monitoring.

Tabel 11. Tanggapan pihak sekolah terhadap kebijakan yang dilakukan Dikpora dalam pelaksanaan KTSP :

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Sangat Mendukung	6	100 %
2	Menurut Saja	0	0 %
3	Tidak Menjawab	0	0 %
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menjawab 100% sangat mendukung kebijakan yang dilakukan Dikpora dalam pelaksanaan KTSP karena dapat membantu perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan

Tabel 12. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KTSP di sekolah supaya dapat meningkatkan pendidikan :

No	Jenis Item Tabel	Jumlah Sekolah	Jumlah Prosentase
1	Ada guru, siswa	0	0 %
2	Ada sekolah	0	0 %
3	Jawaban 1 dan 2	6	100 %
	Total	6	100 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa keseluruhan 6 Sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menjawab 100% faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KTSP di sekolah supaya dapat meningkatkan pendidikan adalah terletak pada guru, siswa, sekolah dan komite sekolah (orang tua)

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Surakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Implementasi Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang KTSP merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan namun dalam pelaksanaannya suatu kebijakan yang telah diimplementasikan terkadang mengalami berbagai hambatan yang terjadi di tengah perjalanan. Hambatan atau kendala tersebut muncul dikarenakan ada beberapa faktor baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Berkaitang dengan kendala

yang muncul setelah dikeluarkannya Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang KTSP di Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran angket pada sekolah-sekolah yang menjadi sampel penelitian serta kegiatan wawancara pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta yang diwakili oleh Wakasek Bidang Kurikulum yaitu Bp. Drs. Suryadi, Mpd menyatakan bahwa :<sup>40</sup>

*Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah SMA Negeri 1 Surakarta dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 adalah guru belum sepenuhnya memahami tentang KTSP, media pembelajaran masih belum memadai, kurangnya evaluasi dari pusat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.*

*Kendala terberatnya yang di hadapi pihak sekolah dalam melaksanakan KTSP terletak pada sarana dan prasarana yang belum memadai.*

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Surakarta Bp. Drs. Ngadiyo, Mpd. Menyatakan bahwa :<sup>41</sup>

*Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 antara lain : adanya surat pemberitahuan larangan untuk dana pembagunan, isu sekolah gratis, terbayangi adanya kesulitan mencari pekerjaan, kesadaran orang tua murid terhadap dukungan pendanaan dengan isu sekolah gratis sehingga kepercayaan orang tua akan menurun terhadap sekolah, jumlah mata pelajaran sangat banyak menyebabkan pengurangan jam pada mata pelajaran ciri khas jurusan sehingga mata pelajaran yang diberikan agak dangkal.*

*Kendala terberat yang ada pada SMA Negeri 3 antara lain pada pendanaan disebabkan adanya SE Walikota Tentang Sekolah Gratis, KTSP yang didesain sendiri kurangnya pengalaman dalam mendesain sehingga hasilnya belum maksimal.*

---

<sup>40</sup> Suryadi, *op.cit*

<sup>41</sup> Wawancara, Ngadiyo

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surakarta Bp. Drs. Unggul sudarmo, Mpd. Menyatakan bahwa :<sup>42</sup>

*Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) : secara umum tidak ada, sekitar 75- 80 % sudah melaksanakan KTSP selama sekolah masih diperbolehkan menghimpun maka dukungan pun masih belum cukup, penghambat kebijakan terletak pada keseragaman yang sifatnya Ujian Nasional (UN), kepedulian guru untuk memahami pelaksanaan KTSP, beban guru menjadi lebih banyak dan evaluasi yang harus diidentifikasi.*

*Kendala yang terberat yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan KTSP adalah komitmen guru dan kebijakan yang mendadak yang sudah ada belum dilaksanakan disusul kebijakan yang baru sehingga beban guru menjadi lebih banyak dan evaluasi yang perlu diidentifikasi.*

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Surakarta Bp. Drs. Kardjo, MA. Menyatakan bahwa :<sup>43</sup>

*Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) : tidak semua guru memahami KTSP, tidak dilaksanakan remedial sepanjang semester oleh guru.*

*Kendala terberat yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan KTSP adalah tidak dilaksanakannya remedial sepanjang semester.*

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Warga Surakarta Ibu. Dra. CH Titik Purwanti Menyatakan bahwa :<sup>44</sup>

*Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) : belum semua guru bisa melaksanakan pembelajaran ICT, inputnya kurang, sarana prasarana belum memadai, otonomi pendidikan perlu diselaraskan, kurangnya SDM bagi pengajar.*

*Kendala terberat yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan KTSP adalah kurangnya SDM bagi tenaga pengajar.*

---

<sup>42</sup> Wawancara, Unggul Sudarmo

<sup>43</sup> Wawancara, Kardjo.

<sup>44</sup> Wawancara, Titik Purwanti

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Surakarta Bp. Drs. Mulyanto Menyatakan bahwa :<sup>45</sup>

*Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) : siswanya merupakan sisa dari sekolah negeri, sarana prasarana belum memadai, biaya mandiri (orang tua) juga ada bantuan dari pemerintah, SDM belum memadai, inputnya rendah*

*Kendala terbesar yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan KTSP adalah belum punya multimedia, media pembelajaran.*

Dari berbagai kendala yang disebutkan oleh para responden tersebut, maka persoalan yang timbul sebelum dan sesudah dikeluarkannya Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang KTSP berfokus pada permasalahan anggaran pendidikan, lemahnya formulasi kebijakan yang berdampak pada saat pelaksanaan kebijakan menjadi pincang saat mencari payung hukum yang kuat sebagai dasar landasan bagi dikeluarkannya kebijakan. Hal tersebut juga dirasakan dan dialami pihak sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta di kota Surakarta dalam melaksanakan Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang KTSP. Berikut ini merupakan inti permasalahan yang dihadapi oleh semua sekolah yang dijadikan sampel penelitian antara lain :

3. Strategi Yang Dilakukan Oleh Pihak Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta Terhadap Permasalahan Otonomi Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan KTSP

Berbagai persoalan yang timbul dari implementasi Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang KTSP terhadap otonomi pendidikan perlu segera dicari penyelesaiannya. Berikut ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah kota Surakarta tentang pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) :

---

<sup>45</sup> Wawancara, Mulyanto

1. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung seperti kelengkapan administrasi, media pembelajaran (Komputer, LCD, OHP, dll).
2. Meningkatkan profesionalisme guru dengan mngirimkan tenaga ahli ke sekolah maupun sebaliknya guru dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, IHT, Workshop, seminar yang berskala lokal maupun nasional, lebih mengefektifkan kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), memberikan tambahan jam bagi mata pelajaran ciri khas jurusan.
3. Menyediakan sistem administrasi yang baik untuk melakukan sistem penilaian bagi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
4. Melakukan pemahaman melalui KTSP secara holistik, filosofinya sampai implementasi kepada semua “*Stake Holders*” (masyarakat, Pemkot dan pemerintah yang terkait).

### C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Menengah Kota Surakarta Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pendidikan bermutu merupakan apa yang harus dilakukan oleh sekolah agar dapat berhasil dan meningkatkan mutu pendidikan. Para profesional sekarang ini kurang memiliki pengetahuan tentang pendidikan atau pengalaman yang diperlukan untuk menyiapkan para siswanya untuk memasuki pasar kerja global. Tradisi rupanya menghalangi proses pendidikan untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar programnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Masyarakat menuntut mutu pendidikan diperbaiki, namun masyarakat enggan mendukung dunia pendidikan untuk mengupayakan pendidikan

Para profesional pendidikan mestinya sadar akan program mutu di dunia komersial tidak bisa dijalankan dalam bidang pendidikan karena proses

kerja, budaya dan lingkungan organisasi di kedua bidang itu berbeda dan para profesional pendidikan harus diberi program mutu yang khusus dirancang untuk dunia pendidikan. Salah satu komponen program mutu dalam pendidikan adalah pengembangan sistem pengukuran yang memungkinkan para profesional pendidikan mendemonstrasikan dan menunjukkan nilai tambah pendidikan bagi siswa dan komunitasnya.

Menurut filosofi Dr. W. Edward Deming yang dikutip oleh Dr. Josep S. Jerome Dasar misi mutu sekolah, ” Mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat ”<sup>46</sup>. Mutu dapat dijamin dengan cara memastikan setiap individu bidang yang diperluakan untuk menjalankan pekerjaan yang tepat, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan antara lain.<sup>47</sup>

*Pertama* anggota dewan sekolah dan administrasi harus menerapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai

*Kedua* menekankan pada upaya pencegahan, kegagalan pada siswa bukan mendeteksi kegagalan setelah peristiwa terjadi

*Ketiga* diterapkan secara ketat penggunaan metode kontrol yang dapat memperbaiki *Out comes* siswa *a main*

Ada beberapa pandangan mutu pendidikan merupakan tujuan utama<sup>48</sup>

1. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal waktu
2. Memberikan mutu merupakan proses berkesinambungan bukan program sekali jalan
3. Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator
4. Pelatihan masal merupakan prasyarat mutu
5. Setiap orang disekolah mesti mendapatkan pelatihan

---

<sup>46</sup> Josep S. Jerome, Pendidikan Berbasis Mutu, hlm. 8

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>48</sup> *Loc.cit*, hlm. 11

Transparansi mutu pendidikan diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrasi, staf, siswa, guru, dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi untuk setiap sekolah serta departemen yang terkait. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan *costumer* mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, pengembangan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, memegang sistem yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras, membuat produk pendidikan menjadi lebih baik

Managemen mutu terpadu merupakan metode yang membantu profesional pendidikan untuk menjawab tantangan lingkungan masa kini dapat dipergunakan sebagai perangkat untuk membangun aliansi antara pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Aliansi pendidikan memastikan bahwa para profesional sekolah memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan program pendidikan antara lain dengan memberikan fokus pada pendidikan dan masyarakat, membentuk infrastruktur yang fleksibel yang dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan masyarakat, dapat membantu pendidikan menyesuaikan diri dengan keterbatasan dana dan waktu, memudahkan sekolah mengelola perubahan

Piramida kepemimpinan mutu perubahan peran para profesional pendidikan sekarang ini bahwa dewan sekolah, pengawas dan administrasi, berperan dalam memfokuskan diri serta memberi arahan pada sekolah yang memiliki visi masa depan dan mengugah para guru dan staf untuk mau menerima visi sebagai miliknya yang mengacu pada konsep "tanggung jawab bersama". Para guru dan staf memiliki komitmen untuk mewujudkan visi tersebut.

Kriteria mutu pendidikan didasarkan pada konsep kriteria pendidikan disesuaikan budaya khas pendidikan, mutu diarahkan *Costumer* merupakan konsep strategi dalam pendidikan, nilai inti didasarkan pada keyakinan bahwa mutu pendidikan akan bertambah baik begitu pula siswa dipandang lebih bertanggung jawab atas nilai pendidikan, setiap orang tua dan komunitas akan merefleksikan persepsi siswa tentang nilai pendidikan. Mutu ini diarahkan untuk

prestasi siswa, ini menuntut kepekaan yang konsisten atas munculnya tuntutan siswa dan pengukuran faktor yang mendorong kepuasan siswa. Hal ini pun menuntut adanya kesadaran perkembangan mutakhir dalam pendidikan dan respon yang cepat dari siswa, selain itu pendekatan sekolah / wilayah untuk mengatasi rendahnya kinerja siswa cukup penting guna memperbaiki mutu pendidikan maupun hubungan dengan siswa, orang tua, dan komunitas.

Anggota dewan sekolah, administrator dan guru harus menciptakan nilai-nilai mutu yang jelas, menyusun strategi, sistem, metode, untuk mencapai keunggulan pendidikan. Memperhatikan perbaikan sistem pendidikan antara lain

1. Meningkatkan mutu pendidikan pada siswa melalui pengembangan layanan baru pendidikan
2. Mengurangi ketidak konsistenan yang membuat kredibilitas proses pendidikan dipertanyakan
3. Memperbaiki cara menanggapi tuntutan siswa
4. Memperbaiki produktifitas dan efektifitas penggunaan sumber daya
5. Cepat tanggap pada *Costumer* pada ciri dan sasaran mutu yang utama
6. Sekolah hendaknya berupaya mengembangkan kemitraan dengan kerja sama pada para "*Stakeholders*" pendidikan terkait wujud kemitraan itu hendaknya menjadi sarana komunikasi berskala, pendekatan untuk mengevaluasi kemajuan, sarana untuk memodifikasi tujuan dan metode untuk mengakomodasi perubahan kondisi<sup>49</sup>

Berbagai proses kegiatan yang telah dilakukan dalam sebuah implementasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah menengah untuk melaksanakan aturan tersebut mengacu kepada Standar Isi atau SI dan standar nasional kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BNSP serta menikuti ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam Undang-undang No.20 / 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005 yang digunakan sebagai dasar dalam

---

<sup>49</sup> *op.cit*, hlm.25.

melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendinas No.22 Tahun 2006 Tentang KTSP pada Sekolah Menengah Atas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menunjukkan bahwa dari keseluruhan 6 sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menjawab sudah melaksanakan dan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta di Surakarta yang dapat diukur keberhasilannya melalui 6 variabel untuk menilai kebijakan sebagaimana disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn (Budi winarno)<sup>50</sup>, yaitu sebagai berikut :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana
- e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
- f. Kecenderungan pelaksana (*Implementers*)

Adapun aplikasi masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran ini di dasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan sangat berguna dalam menguraikan tujuan secara menyeluruh. Disamping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam berbagai kasus. Dari hasil penelitian pada tabel 4, bahwa sasaran atau fokus kebijakan beserta tujuan yang akan dicapai dengan dikeluarkannya Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang KTSP masing-masing menunjukkan 100 % untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

---

<sup>50</sup> Budi Winarno, 2002, hlm. 111

b. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang yang mendorong memperlancar implementasi yang efektif. Dari hasil penelitian dalam tabel no 9. menunjukkan bahwa angka prosentase sebesar 100 % didukung oleh dana secara material dan sarana dan prasarana penunjang.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dalam merumuskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari organisasi yang satu ke organisasi lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan 83,4 % dilakukan sistem monitoring sebagai salah satu wujud komunikasi antar organisasi dalam hal ini antara sekolah dengan dikpora dan 16,6 % kegiatan yang dilakukan melalui pengiriman pengawas dari dikpora untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan pihak sekolah dalam rangka pelaksanaan kebijakan.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan administrasi berkaitan dengan struktur birokrasi yakni karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83,4 % menilai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam menjalankan kebijakan terlihat jelas (adanya kesesuaian) dan 16,6 % menunjukkan kurangnya kesesuaian antara kebijakan dengan norma-norma dan pola-pola hubungan sehingga hanya penilaian terhadap kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sehingga birokrasi sebagai institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan yang tingkat kepentingannya berbeda.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan pusat perhatian yang sangat besar dalam mengidentifikasi pengaruh variabel di lingkungan dari hasil-hasil kebijakan. Hasil penelitian dalam tabel no. 7 menunjukkan 83,4 % menyatakan kesiapan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum jelasnya aturan yang mewadai yang di susun dalam senuh instrument hukum dalam hal ini Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini belum dikeluarkan sebagai dasar pijakan pelaksanaan KTSP untuk semua jenjang pendidikan

f. Kecenderungan pelaksana ( *Implementers* )

Berkaitan dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan itu sendiri seperti kognisi, komprehensi (pemahaman), macam tanggapan dan intensitas tanggapan dari hasil penelitian dalam tabel 11. menunjukkan bahwa kecenderungan pelaksana yang terkait tentang kebijakan menunjukkan 100 % hal ini dikarenakan masing-masing Kepala Sekolah ditingkat Pendidikan Menengah Atas berusaha melaksanakan kebijakan dari atasannya.

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Surakarta Dalam Rangka Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Dari berbagai kendala yang disebutkan oleh para responden sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah kota dalam mengelola pendidikan yang ada di daerahnya sangat kompleks sekali antara lain berfokus pada permasalahan anggaran pendidikan, lemahnya formulasi kebijakan yang berdampak pada saat pelaksanaan kebijakan menjadi pincang saat mencari payung hukum yang kuat atau sebagai dasar landasan dikelurkannya kebijakan

selanjutnya proporsi anggaran pendidikan yang selama ini dipusat 70 % untuk pengelolaan di pusat / wilayah hanya 30 % untuk sekolah perlu diubah menjadi 10 % untuk pengelolaan dan 40 % untuk sekolah, sedang 50 % lainnya untuk fungsi pemerataan bagi sekolah-sekolah yang belum memperoleh alokasi bantuan atau subsidi.

Untuk itu agar beban pemerintah pusat tidak begitu berat, maka otonomi pendidikan perlu dilakukan dengan maksud untuk mendistribusikan beban tersebut ke daerah-daerah sehingga beban pemerintah pusat berkurang dan sebagai penggantinya pemerintah daerah beserta masyarakat ikut menanggung beban tersebut. Selanjutnya dari berbagai kendala tersebut memperlihatkan adanya kelemahan-kelemahan terhadap komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- a. Sebagian kepala sekolah, guru, pengawas belum memahami secara utuh esensial dari KTSP (waktu sosialisasi, pembuatan dan pelaksanaannya nyaris bersamaan dengan model sosialisasi “berantai”).
- b. Kompetensi dan kultur kerja guru saat ini menjadi penghambat pembuatan KTSP yang sesuai dengan tuntutan.
- c. Super visi dan pembuatan konten KTSP oleh Dinas Pendidikan cenderung pada kelengkapan dan prosedur administrasi sedang substansi keilmuan (mapel) dan kebenaran isi silabus kurang mendapatkan perhatian.
- d. Keterbatasan referensi di sekolah khusus silabus, RPP, dan bahan ajar.
- e. Pengembangan bentuk penilaian dan instrumen penilaian yang mengukur kompetensi belum tersedia.
- f. Sarana prasarana masih kurang memadai.

### 3 Strategi Yang Dilakukan Oleh Pihak Sekolah Menengah Kota Surakarta Terhadap Otonomi Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan KTSP 2006

Dari hasil penelitian yang dilakukan pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Surakarta terhadap permasalahan strategi yang harus dilaksanakan terhadap pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, yaitu :

- a. Menambah kelengkapan sarana an prasarana yang mendukung seperti : kelengkapan administrasi, media pembelajaran (komputer, LCD, OHP, dll).
- b. Meningkatkan profesional guru dengan mengirimkan tenaga ahli ke sekolah maupun sebaliknya guru dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, IHT, workshop, seminar yang berskala lokal maupun nasional dan lebih mengefektifkan kegiatan MGMP.
- c. Menyediakan sistem administrasi yang baik untuk melkukan sistem penilaian bagi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara menyeluruh.
- d. Menggunakan strategi pendekatan kepada PemKot, Dikpora, Dinas Pendidikan Nasional, Komite Sekolah baik mengenai program maupun pendanaan.
- e. Semua program disosialisasikan dengan lembaga-lembaga terkait (DPRD, BKD, Kepolisian) agar semua tahu tentang program Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Untuk mengimbangi adanya otonomi pendidikan yang dilakukan seiring dengan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat harus mencegah terjadinya perkembangan yang mengarah pada egoisme sempit di kalangan pengelola pendidikan. Oleh karena itu diperlukan strategi pendayagunaan sumber daya pendidikan yang spektrumnya bisa antar wilayah, sekolah, antar perguruan tinggi, antar sektor, antar pemerintah daerah, keluarga dan kelompok masyarakat. Strategi ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah antara lain :

- a) Memungkinkan terjadinya kerja sama yang sinergis antara potensi pendidikan di daerah.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan.
- c) Menghidupkan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan.



## **BABV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan yang diperoleh dari wawancara dari sekolah menengah atas negeri dan swasta yang ada di kota surakarta dan dari dinas terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beserta *stakeholders* dipadukan dengan data yang berasal referensi kemudian di analisis, maka pada bagian penutup penelitian ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan tentang Impelemntasi Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta).

1. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta menunjukkan bahwa dari keseluruhan enam sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini 100 % menjawab sudah melaksanakan dengan berbagai fariasi yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terhadap pelaksanaan KTSP sudah dilaksanakan oleh seluruh sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta yang disukung oleh enam variablel untuk menilai kebijakan yaitu : a) ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan masing-masing menunjukkan 100 %. b) Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang yang mendorong memperlancar implementasi yang efektif menunjukkan bahwa angka prosentase sebesar 100 % didukung oleh dana secara material dan sarana dan prasarana penunjang. c) komunikasi antar organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dalam merumuskan pesan-pesan ke bawah

dalam suatu organisasi atau dari organisasi yang satu ke organisasi lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan 83,4 % dilakukan sistem monitoring sebagai salah satu wujud komunikasi antar organisasi dalam hal ini antara sekolah dengan dikpora dan 16,6 % kegiatan yang dilakukan melalui pengiriman pengawas dari dikpora untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan pihak sekolah dalam rangka pelaksanaan kebijakan. d) Karakteristik badan-badan administrasi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 83,4 % menilai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam menjalankan kebijakan terlihat jelas (adanya kesesuaian) dan 16,6 % menunjukkan kurangnya kesesuaian antara kebijakan dengan norma-norma dan pola-pola hubungan sehingga hanya penilaian terhadap kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sehingga birokrasi sebagai institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan yang tingkat kepentingannya berbeda.e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan pusat perhatian yang sangat besar dalam mengidentifikasi pengaruh variabel di lingkungan dari hasil-hasil kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan 83,4 % menyatakan kesiapan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum jelasnya aturan yang mewadai yang di susun dalam senuh instrument hukum dalam hal ini Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini belum dikeluarkan sebagai dasar pijakan pelaksanaan KTSP untuk semua jenjang pendidikan. f) Kecenderungan pelaksana menunjukkan bahwa kecenderungan pelaksana yang terkait tentang kebijakan menunjukkan 100 % hal ini dikarenakan masing-masing Kepala Sekolah ditingkat Pendidikan Menengah Atas berusaha melaksanakan kebijakan dari atasannya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Surakarta dalam rangka melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 antara lain Kesiapan sarana dan prasarana yang

masih terbatas, Terbatasnya sumber dana untuk mengoperasikan segala kebutuhan guna melaksanakan kebijakan, Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga pendidik dalam mengubah paradigma kurikulum lama dan mentransfernya kepada anak didik, Terlalu rumitnya sistem penilaian untuk kurikulum KTSP 2006.

3. Strategi Yang Dilakukan Oleh Pihak Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta Terhadap Permasalahan Otonomi Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan KTSP antara lain : Menambah sarana dan prasarana yang mendukung seperti kelengkapan administrasi, media pembelajaran (komputer, LCD, OHP, dll), Mencari dana untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan cara menaikkan pembayaran uang SPP, pembayaran uang gedung, Meningkatkan profesionalisme guru dengan mngirimkan tenaga ahli ke sekolah maupun sebaliknya guru dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, IHT, Workshop, seminar yang berskala lokal maupun nasional, lebih mengefektifkan kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), memberikan tambahan jam bagi mata pelajaran ciri khas jurusan, Menyediakan sistem administrasi yang baik untuk melakukan sistem penilaian bagi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Melakukan pemahaman melalui KTSP secara holistik, filosofinya sampai implementasi kepada semua "*Stakeholders*" (masyarakat, pemkot dan pemerintah yang terkait).

## B. Implikasi

Sehubungan dengan hasil penelitian maka dapat disampaikan implikasi penelitian sebagai berikut :

Dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan keberhasilan implemntasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Kurikulum Singkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka meningkatkan mutu di Sekolah

Menengah Atas Kota Surakarta, maka diharapkan dalam proses pembelajaran dapat menumbuhkan gairah dan motifasi bagi peserta didik, guru sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan khususnya pendidikan di daerah para pembuat kebijakan "*Stakeholders*" yang terkait di bidang pendidikan harus konsisten terhadap dunai pendidikan dengan menjalankan mekanisme yang harmonis di antara para "*Stakeholders*" pendidikan baik pada tingkat pusat, antar departemen, dan kantor menteri Negara yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional sampai instansi terkecil di daerah. Di tingkat propinsi dan kabupaten / kota diperlukan pula jalinan kerja sama antara pihak eksekutif, legislatif, dan wakil dari masyarakat sebagai pelaksana berbagai kebijakan dari pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak timpang dalam proses formulasi, implementasi, bahkan sampai dengan proses evaluasinya.

Para "*Stakeholders*" pendidikan harus memperhatikan acuan dalam mengeluarkan kebijakan publik misalnya peraturan perundangan yang berlaku, karena melalui peraturan hukum pemerintah dapat melaksanakan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang nyata. Jika semua unsur-unsur dan mekanisme kebijakan telah terpenuhi, maka kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi dapat ditekan seminimal mungkin.

### C. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan pada bagian akhir penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi pembuat kebijakan (*Stakeholders*)

Diharapkan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan antara pemerintah pusat melalui Pusat Kurikulum dan Badan Standar Pendidikan Nasional serta Mendiknas dengan pemerintah daerah melalui

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat untuk mensosialisasikan dan mengevaluasi sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi pelaksanaan kebijakan khususnya bantuan untuk biaya operasional keseluruhan kebijakan yang dihasilkan, sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

## 2. Bagi Warga Sekolah dan Masyarakat

Diupayakan untuk selalu mengembangkan pendayagunaan bersama sumber daya pendidikan yang dikembangkan menjadi hubungan yang simbiotik antara pemerintah, politisi, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM, dan yayasan-yayasan. Hubungan simbiotik tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin Ibrahim, (2004) Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP), Bandung : Mandar Maju
- Anonim, 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- \_\_\_\_\_, 2002. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
- Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo
- Burhan Ashofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Prasetyo, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Budiyono, 2004. Statistika Untuk Penelitian. Surakarta : Sebelas Maret University
- PerssDepartemen Pendidikan Nasional, 2008. Bahan/Materi Bintek KTSP SMA Tingkat Kabupaten/Kota.
- Charles O. Jones, 1996. Pengantar Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- DEPDIKNAS, Bahan Materi Bintek KTSP SMA Tingkat Kabupaten/Kota, 2008
- Edy Suandi & Sobirin Marian, et al, 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah (Kebijakan Fadillah Putra, 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Surabaya : Pustaka Pelajar Offsets Evaluasi dan Sasaran). Yogyakarta : UII Perss
- H.A.R Tilaar, 2002. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta
- H.B, Sutopo, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Pers
- Hesel Nogi S Tangkilan, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi (konsep, strategi, dan kasus). Yogyakarta : lukman offset

- Inu Kencana Syafii, 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
- Jeromo S. Coro, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan
- Mardalis, 2002. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Alumni
- M. Irfan Islami, 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Muhamad Sirozi, 2004. Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia (Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2 / 1989).Leiden-Jakarta : INIS
- Sukardi, 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktek. Jakarta : Bumi Aksara.
- Setiono, 2002. Pemahaman Terhadap Penelitian Hukum. Surakarta. Surakarta: Pasca Sarjana UNS
- Sanafiah Faisal, 1981. dasar dan tehnik Menyusun Angket. Surabaya : Usaha Nasional
- Soerjono Soekanto,1986.PengantarPenelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Perss
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.Jakarta : ELSAM dan HUMA
- Wina Sanjaya, 2008. Kurikulum dan Pembelajaran (Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

**JURNAL :**

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 5, Nomer 1 (Mei 2002) ISSN : 0852-9213, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Magister Administrasi Publik

Analisis CSIS, Otonomi Daerah Penyelesaian Atau Masalah ?. Tahun XXIX / 2000, Nomer 1. Center For strategicAnd International Studies

Barbara Glesner fines, The Impact of Expectation on Teaching and Learning, Vol 38, 2002, University of Missouri Kansas City

David A. Thomas, The law School Rankings are Harmful Deceptions: A Response to Those Praise the rankings and Sugestions for a Better approach to evaluating Law School, Vol. 40, pp. 419-459 Summer 2003

Dokumentasi (Kliping Tentang Arah Perkembangan Pendidikan Di Indonesia, Tahun XIII, Nomer 8 (Agustus 2001). Center For strategicAnd International Studies

Harriet N. Katz, Personal Journals in Law School Extership Program: Improving Pedagogy, Thomas M. Cooley Journal of Practicial and Clinical Law, Vol. 1 No. 7, 1997

**MAKALAH :**

Setiono, 2002. Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum. Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana : UNS

**PerUndang-undangan :**

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Dosen dan Guru

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

Permen No. 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

PERDA Kota Surakarta No. 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategi Daerah

Permen No. 25 Tahun 2006 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan

Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

## LAMPIRAN 1

## DAFTAR NAMA SMA NEGERI DAN SWASTA KOTA SURAKARTA

No	Nama Sekolah	Kecamatan
1	SMA Negeri 1 Surakarta	Banjarsari
2	SMA Negeri 2 Surakarta	Banjarsari
3	SMA Negeri 3 Surakarta	Jebres
4	SMA Negeri 4 Surakarta	Banjarsari
5	SMA Negeri 5 Surakarta	Banjarsari
6	SMA Negeri 6 Surakarta	Banjarsari
7	SMA Negeri 7 Surakarta	Serengan
8	SMA Negeri 8 Surakarta	Jebres
9	SMA Muh	Banjarsari
10	SMA Muh	Banjarsari
11	SMA Muh	Jebres
12	SMA Muh	Banjarsari
13	SMA Muh	Banjarsari
14	SMA Muh	Banjarsari
15	SMA Kristen 1	Serengan
16	SMA Kristen 2	Banjarsari
17	SMA Kanisius	Pasar Kliwon
18	SMA Pangudi Luhur	Laweyan
19	SMA Regina Pacis	Laweyan
20	SMA Warga	Jebres
21	SMA Kristen Widya Wacana	Jebres
22	SMA Kristen Widya Parama	Banjarsari
23	SMA Santo paulus	Laweyan
24	SMA Santo Xaverius	Banjarsari
25	SMA Al- Islam 1	Laweyan

26	SMA Al- Islam 2	Laweyan
27	SMA Al- Islam 3	Laweyan
28	SMA Islam 1	Pasar Kliwon
29	SMA Islam Diponegoro	Pasar Kliwon
30	SMA MTA	Pasar Kliwon
31	SMA Al-Muayyad	Laweyan
32	SMA Batik 1	Laweyan
33	SMA Batik 2	Laweyan
34	SMA TP 1	Banjarsari
35	SMA Murni	Laweyan
36	SMA Yosodipuro	Laweyan
37	SMA Tripusaka	Jebres
38	SMA Cokroaminoto	Serengan
39	SMA Bhineka Karya	Banjarsari
40	SMA 17	Banjarsari
41	SMA Widya Bakti	Laweyan

**DAFTAR SMA NEGERI DAN SWASTA KOTA SURAKARTA YANG  
DIJADIKAN SAMPEL DALAM PENELITIAN**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	
1.	SMA NEGERI 1 SURAKARTA	Banjarsari	
2.	SMA NEGERI 3 SURAKARTA	Jebres	
3.	SMA NEGERI 2 SURAKARTA	Banjarsari	
4.	SMA NEGERI 5 SURAKARTA	Banjarsari	
5.	SMA KRISTEN 2 SURAKARTA	Banjarsari	
6.	SMA WARGA SURAKARTA	Banjarsari	

## LAMPIRAN 2

ANGKET IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NO. 22 TAHUN 2006  
TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN  
PENDIDIKAN (KTSP) DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU  
PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA SURAKARTA

Kepada :

Yth : Ka. SMA Negeri / Swasta Kota Surakarta

Di Surakarta

Dengan hormat,

Di tengah kesibukan Bapak / Ibu sebagai Kepala Sekolah, perkenankanlah peneliti memohon waktu Bapak / Ibu untuk menjawab daftar pertanyaan yang bersama ini saya lampirkan. maksud dan tujuan pengisian angket ini adalah untuk mendapatkan data dalam penulisan Tesis peneliti sebagai syarat memperoleh gelar Magister pada Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum UNS.

Penelitian ini ditujukan untuk kepentingan ilmiah semata sehingga rahasia responden akan peneliti jamin sepenuhnya, oleh karena itu informasi dan data dari Bapak / Ibu lewat pengisian angket ini merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini.

Akhirnya atas bantuan Bapak / Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih

Hormat kami,

Suharmi

Peneliti

NIM : S. 310580211

## ANGKET

Impelementasi Permendiknas No.22 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta)

Petunjuk : berilah tanda silang ( X ) pada lembar jawaban yang sudah tersedia

1. Apakah Permendiknas No. 22 Tahun 2006 sudah dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta ?  
tentang KTSP ?
  - a. Sudah
  - b. Belum
  - c. Tidak menjawab
2. Apakah pihak sekolah sudah mengetahui tujuan dilaksanakannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ?
  - a. Sudah
  - b. Belum
  - c. Tidak menjawab
3. Menurut pihak sekolah, sudah memahami secara penuh dikeluarkannya Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tersebut ?
  - a. Memahami sepenuhnya
  - b. Cukup memahami
  - c. Tidak memahami
4. Apakah pihak sekolah, sasaran atau fokus Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang KTSP dilaksanakan untuk ?
  - a. Meningkatkan mutu pendidikan
  - b. Meningkatkan daya serap peserta didik
  - c. Meningkatkan daya tampung siswa
5. Menurut pihak sekolah, tujuan perumusan kebijakan pemerintah kota surakarta dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah dalam rangka ?
  - a. Otonomi pendidikan dan desentralisasi pendidikan daerah
  - b. Diversifikasi kurikulum dalam dunia pendidikan
  - c. Jawab A dan B
6. Menurut pihak sekolah, apakah Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah sesuai dengan otonomi pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah ?
  - a. Sesuai
  - b. Belum sesuai
  - c. Tidak sesuai
7. Bagaimana kesiapan sekolah dalam melaksanakan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ?
  - a. Siap
  - b. Cukup siap
  - c. Tidak siap

8. Kegiatan yang dilakukan pihak sekolah untuk melaksanakan kurikulum KTSP bagi guru dan siswa ?
    - a. Melakukan sosialisasi dan kegiatan lain yang menunjang
    - b. Mengadakan komunikasi dengan dinas terkait
    - c. Tidak ada sama sekali
  9. Menurut pihak sekolah, sumber penunjang yang paling dominan untuk keberhasilan implementasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang KTSP adalah ?
    - a. Dana secara material
    - b. Sarana dan prasarana
    - c. Kedua-duannya
  10. Apakah ada sistem monitoring yang dilakukan oleh Dikpora untuk tindak lanjut dari pelaksanaan KTSP 2006 ?
    - a. Ya ada
    - b. Tidak ada
    - c. Tidak menjawab
  11. Bagaimana tanggapan pihak sekolah terhadap kebijakan yang dilakukan Dikpora dalam pelaksanaan KTSP tersebut?
    - a. Sangat mendukung sekali karena dapat membantu perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan
    - b. Menurut saja, karena itu sudah menjadi kebijakan dari atasan
    - c. Tidak menjawab
  12. Apakah ada factor yang mempengaruhi pelaksanaan KTSP di sekolah ini ? supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan ?
    - a. Ada guru, siswa
    - b. Ada sekolah, orang tua
    - c. Jawaban. A dan B
- B. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta terhadap permasalahan otonomi pendidikan dalam rangka pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006.
1. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan kurikulum KTSP 2006 ?
  2. Dari berbagai kendala yang ada, kendala apa yang terberat yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan KTSP 2006 ?
- C. Strategi yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Kota Surakarta terhadap permasalahan otonomi pendidikan dalam rangka pelaksanaan KTSP 2006.
1. Strategi apa saja yang diusahakan pihak sekolah untuk melaksanakan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang kurikulum KTSP ?

## LAMPIRAN 4

## Kumpulan Data Hasil Wawancara dengan 6 SMA Negeri dan Swasta di Surakarta

No	NAMA SEKOLAH	KENDALA	STRATEGI	TGL WAWANCARA
1	SMA NEGERI 1 SURAKARTA	guru belum sepenuhnya memahami tentang KTSP, media pembelajaran masih belum memadai, kurangnya evaluasi dari pusat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.	Sosialisasi kurikulum, KTSP, menyiapkan sarana prasarana dan meningkatkan SDM	2 Juni 2009
2	SMA NEGERI 3 SURAKARTA	Adanya isu sekolah gratis, terbayangi sulitnya mencari pekerjaan, kesadaran dari orang tua murid terhadap pendanaan, kepercayaan orang tua menurun terhadap sekolah.	Penyusunan program dibuat lebih awal sehingga bisa diteliti secara berulang-ulang, harus ada evaluasi seorang tua menurun terhadap cara menyeluruh, menggunakan strategi pendekatan	2 Juni 2009
3	SMA NEGERI 2 SURAKARTA	Tidak semua guru memahami KTSP, tidak diadakan remedial sepanjang semester	Diadakan <i>workshop</i> pengembangan KTSP, penyempurnaan SK dan KD sesuai hasil analisis, penyempurnaan dan pengembangan RPP	2 juni 2009
4	SMA NEGERI 5 SURAKARTA	Secara umum tidak ada kendala, sekitar 75-80 % sudah melaksanakan KTSP, kebijakan keseragaman yang sifatnya ujian nasional, beban guru semakin banyak	Menjalankan program secara benar walaupun lambat, melakukan pemahaman KTSP secara holistik, filosofi, sampai dengan implementasi kepada <i>Stake Holders</i> (masyarakat, pemkot, dan pemerintah terkait)	2 juni 2009
5	SMA WARGA SURAKARTA	Belum semua guru bisa melaksanakan pembelajaran ICT, kurangnya SDM, input siswa rendah, kurangnya sarana dan prasarana	Peningkatan SDM, peningkatan sarana prasarana,	6 Juni 2009
6	SMA KRISTEN 2 SURAKARTA	Sarana prasarana belum memadai, inputnya rendah, kurangnya SDM	Diadakan IHT, diadakan strategi peningkatan mutu, tambahan jam,	3 Juni 2009

